

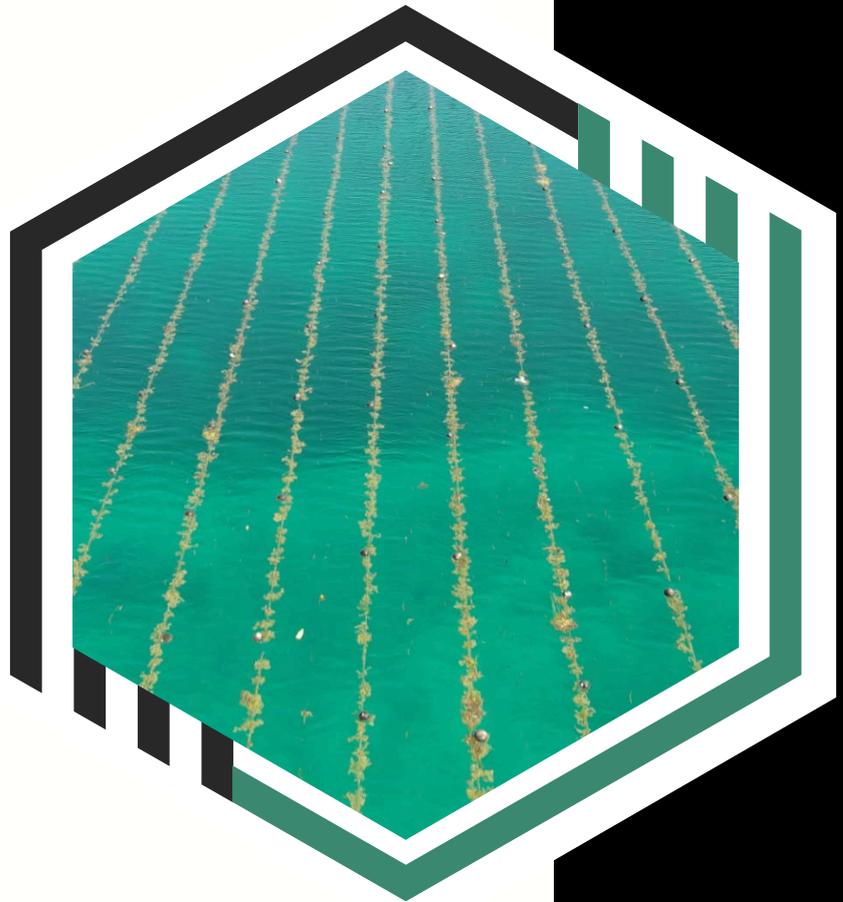


KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN

# LAPORAN KINERJA

## Direktorat Rumput Laut

### TAHUN 2024



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA  
DIREKTORAT RUMPUT LAUT  
2024

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat tersusun Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Rumput Laut Tahun 2024 ini, yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja yang dilakukan oleh Direktorat Rumput Laut selama kurun waktu dari bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2024 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Direktur Rumput Laut tahun 2024.

Laporan kinerja (LKj) Direktorat Rumput Laut Tahun 2024 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Rumput Laut, sehingga dapat menjadikan bahan evaluasi serta dapat memberikan umpan balik untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya atau dapat dijadikan pemicu untuk peningkatan kinerja organisasi serta bahan evaluasi melalui langkah-langkah perbaikan pelayanan yang lebih profesional dan transparan bagi masyarakat.

Demikian laporan ini disajikan semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi kemajuan pembangunan kelautan dan perikanan di masa mendatang.

Jakarta, 17 Januari 2025

Direktur Rumput Laut



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Nono Hartanto

## **PERNYATAAN TELAH DI REVIU**

Kami telah melakukan reviu atas Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Rumput Laut Tahun 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat menjadi tanggung jawab Direktorat Rumput Laut.

Reviu bertujuan memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami tersebut, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan ini.

Jakarta,

2025

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	1
BAB 1	
PENDAHULUAN .....	3
1.1. Latar Belakang .....	3
1.2. Maksud dan Tujuan .....	5
1.3. Tugas dan Fungsi .....	5
1.4. Permasalahan Utama .....	7
1.5. Sistematika Laporan Kinerja (LKj) .....	7
BAB 2	
PERENCANAAN KINERJA .....	9
2.1. Rencana Strategis (Renstra) Budidaya Tahun 2020-2024 .....	9
2.2. Sasaran Strategis .....	10
2.3. Penetapan Kinerja .....	11
2.4. Pengukuran Capaian Kinerja Direktorat Rumput Laut Tahun 2024 .....	14
BAB 3	
AKUNTABILITAS KINERJA .....	17
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	17
3.2. Analisis Kinerja .....	18
A. Terserapnya tenaga kerja sektor perikanan budi daya yang terlibat dalam bidang rumput laut .....	18
A.1. Tenaga kerja yang terlibat di bidang rumput laut .....	18
B. Terkelolanya sistem perbenihan yang berkelanjutan .....	20
B.1. Persentase Bantuan Sarpras UPR/ HSRT yang disalurkan ke Masyarakat .....	20
B.2. Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan ke Masyarakat .....	22
B.3. Persentase Bantuan Benih Ikan yang Disalurkan ke Masyarakat .....	26
B.4. Calon Induk Unggul yang Diproduksi .....	28
B.5. Persentase Bantuan Bibit rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat .....	31
B.6. Persentase Bantuan Kebun Bibit Rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat .....	32
B.7. Modeling Budi Daya Rumput Laut Berbasis Kawasan yang Dibangun .....	33
B.8. Persentase Progres Operasional Pusat Produksi Benih dan Induk ...	36
C. Meningkatnya Akses Permodalan dan Jaminan Usaha Bidang Perbenihan .....	38
C.1. Persentase NSPK Bidang Perbenihan yang Disusun .....	38
D. Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya Bidang Perbenihan .....	43
D.1. Persentase Unit Usaha yang mendapatkan Pembinaan CPIB .....	43
E. Terkelolanya Pemerintahan Yang Baik di Direktorat Rumput Laut .....	44
E.1. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Rumput Laut .....	44
E.2. Nilai PM SAKIP di Direktorat Rumput Laut .....	46

E.3. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Rumput Laut .....	46
E.4. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Direktorat Rumput Laut.....	47
E.5. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas / Strategis Lingkup Direktorat Rumput Laut.....	48
E.6. Jumlah Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi KUSUKA.....	49
E.7. Nilai Pengawasan Kearsipan Unit Kearsipan Direktorat Rumput Laut .....	50
E.8. Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Rumput Laut.....	51
E.9. Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Rumput Laut.....	51
<b>BAB 4</b>	
<b>PENUTUP.....</b>	<b>52</b>
4.1. KESIMPULAN.....	52
4.2. REKOMENDASI .....	53

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Indikator Kinerja Organisasi Direktorat Rumput Laut Tahun 2024 ..	1
Tabel 1.1.	Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Tahunan Direktorat Rumput Laut Tahun 2024 .....	4
Tabel 3.1.	Capaian Kinerja sampai Desember Tahun 2024 Direktorat Rumput Laut .....	17
Tabel 3.2.	Capaian Tenaga kerja yang terlibat di bidang rumput laut .....	19
Tabel 3.3.	Capaian indikator kinerja bantuan sarpras UPR/ HSRT yang disalurkan ke masyarakat .....	21
Tabel 3.4.	Unit Pelaksana Teknis DJPB yang melaksanakan bantuan calon induk .....	22
Tabel 3.5.	Capaian IKU Calon induk yang didistribusikan berdasarkan usulan masyarakat .....	23
Tabel 3.6.	Capaian indikator kinerja persentase bantuan benih ikan yang disalurkan ke masyarakat .....	26
Tabel 3.7.	Realisasi Bantuan Benih dan Restocking Tahun 2024 .....	27
Tabel 3.8.	Produksi calon induk unggul .....	28
Tabel 3.9.	Capaian IKU produksi calon induk tahun 2024. ....	29
Tabel 3.10.	Target dan produksi calon induk di UPT tahun 2024 .....	30
Tabel 3.11.	Produksi calon induk berdasarkan komoditas pada tahun 2024. ..	30
Tabel 3.12.	Capaian indikator kinerja bantuan Bibit Rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat .....	31
Tabel 3.13.	Capaian indikator kinerja persentase bantuan kebun bibit rumput laut yang disalurkan ke masyarakat .....	33
Tabel 3.14.	Capaian indikator kinerja modeling budi daya rumput laut berbasis kawasan yang dibangun .....	34
Tabel 3.15.	Capaian indikator kinerja progres operasional pusat produksi benih dan induk pada 3 lokasi .....	37
Tabel 3.16.	Capaian Persentase NSPK Bidang Perbenihan yang Disusun .....	39
Tabel 3.17.	Capaian IKU Persentase unit usaha yang mendapatkan pembinaan CPIB dibandingkan dengan yang mendapatkan sertifikat CPIB....	43
Tabel 3.18.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Rumput Laut .....	45
Tabel 3.19.	Nilai PM SAKIP Direktorat Rumput Laut .....	46
Tabel 3.20.	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Rumput Laut .....	47
Tabel 3.21.	Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar Lingkup Direktorat Rumput Laut ..	48
Tabel 3.22.	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Rumput Laut .....	49
Tabel 3.23.	Jumlah Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Terintegrasi KUSUKA .....	49
Tabel 3.24.	Nilai Pengawasan Kearsipan Unit Kearsipan Direktorat Rumput Laut	51
Tabel 3.25.	Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Rumput Laut .....	51
Tabel 3.26.	Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Rumput Laut .....	52

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya ....	7
Gambar 2.1.	Arah Kebijakan Pembangunan Perikanan Budidaya 2020-2024.	9
Gambar 2.2.	Arah Kebijakan dan Strategi Perikanan Budidaya 2020-2024...	10
Gambar 2.3.	Perjanjian Kinerja Direktorat Rumput Laut Tahun 2024 .....	14
Gambar 2.4.	Nilai Capaian Kinerja sampai Bulan Desember Tahun 2024.....	16
Gambar 3.1.	Distribusi bantuan calon induk per satker. ....	24
Gambar 3.2.	Distribusi bantuan calon induk menurut komoditas. ....	25
Gambar 3.3.	Peta sebaran bantuan calon induk tahun 2024.....	25
Gambar 3.4.	Target produksi calon induk tahun 2024 .....	29
Gambar 3.5.	Peta Sebaran Unit Pembenihan Yang Dilakukan Pembinaan CPIB	44

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Rumput Laut Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dalam aplikasi Kinerjaaku sampai bulan Desember tahun 2024 Direktorat Rumput Laut mencapai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 104,01 % dengan jumlah indikator kinerja sebanyak 21 indikator kinerja dengan rincian seperti terlihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Indikator Kinerja Organisasi Direktorat Rumput Laut Tahun 2024

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target	Capaian	%
			2024	DESEMBER	DESEMBER	
<b>SK.01</b>	<b>Terserapnya Tenaga Kerja Sektor Perikanan Budi Daya di Bidang Rumput Laut</b>				<b>61,04</b>	
IKSK.01.1	Tenaga Kerja yang Terlibat di Bidang Rumput Laut (orang)	orang	2.975,00	2.975,00	1.816,00	61,04
<b>SK.02</b>	<b>Terkelolanya Sistem Perbenihan Ikan yang Berkelanjutan</b>				<b>111,76</b>	
IKSK.02.1	Persentase Bantuan Sarpras UPR/HSRT yang disalurkan ke Masyarakat (persen)	persen	75	75	75	100
IKSK.02.2	Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan ke Masyarakat (persen)	persen	75	75	192,99	120
IKSK.02.3	Persentase Bantuan Benih Ikan yang Disalurkan ke Masyarakat (persen)	persen	75	75	97,12	120
IKSK.02.4	Calon Induk Unggul yang Diproduksi (ekor)	ekor	1.000.000	1.000.000	1.115.699	111,57
IKSK.02.5	Persentase Bantuan Bibit rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat (persen)	persen	75	75	119	120
IKSK.02.6	Persentase Bantuan Kebun Bibit Rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat (persen)	persen	75	75	100	120
IKSK.02.7	Modeling Budi Daya Rumput Laut Berbasis Kawasan yang Dibangun (lokasi)	lokasi	2	2	2	100
IKSK.02.8	Persentase Progres Operasional Pusat Produksi Benih dan Induk Pada 3 Lokasi (persen)	persen	60	60	65	108,33
<b>SK.03</b>	<b>Meningkatnya Akses Permodalan dan Jaminan Usaha Bidang Perbenihan</b>				<b>118,3</b>	
IKSK.03.1	Persentase NSPK Bidang Perbenihan yang Disusun (persen)	persen	70	70	82,81	118,3
<b>SK.04</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya Bidang Perbenihan</b>				<b>120</b>	

	IKSK.04.1	Persentase Unit Usaha yang mendapatkan Pembinaan CPIB (persen)	persen	50	50	63,03	120
<b>SK.05</b>		<b>Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Direktorat Rumput Laut</b>				<b>108,94</b>	
	IKSK.05.1	Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Direktorat Rumput Laut (%)	persen	85	85	89,46	105,25
	IKSK.05.2	Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (PM SAKIP) di Direktorat Rumput laut (Nilai)	nilai	82	82	82,8	100,98
	IKSK.05.3	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Rumput Laut (%)	persen	80	80	100	120
	IKSK.05.4	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Direktorat Rumput Laut(%)	persen	94	94	133,33	120
	IKSK.05.5	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Rumput Laut (%)	persen	80	80	82,56	103,2
	IKSK.05.6	Jumlah Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Terintegrasi KUSUKA (%)	persen	91	91	97,43	107,07
	IKSK.05.7	Nilai Pengawasan Kearsipan Unit Kearsipan Direktorat Rumput Laut (Nilai)	nilai	75	75	79,75	106,33
	IKSK.05.8	Indeks Layanan Perkantoran Direktorat Rumput Laut (Nilai)	nilai	80	80	100	120
	IKSK.05.9	Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Rumput Laut (%)	persen	98	98	99,7	101,73

Capaian indikator sampai bulan Desember tahun 2024 seperti terlihat tabel 1 menunjukkan bahwa kinerja Rumput Laut sangat baik karena beberapa indikator kinerja utama untuk melebihi dari target 100%, kecuali 1 (satu) indikator yang tidak mencapai target yaitu terkait tenaga kerja di bidang rumput laut.

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan perikanan budidaya tahun 2020-2024 perlu memiliki perencanaan yang berkualitas, efektif, dan efisien. Sesuai dengan amanat PP No. 17 Tahun 2017, perencanaan dan penganggaran nasional harus dilakukan melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial berdasarkan prinsip *money follows program*. Berdasar pada isu dan permasalahan yang masih dihadapi, Ditjen Perikanan Budi Daya perlu me-reformulasi kebijakan pembangunan 5 tahun ke depan dengan memfokuskan pada pengelolaan sumber daya perikanan budidaya yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial, bukan lagi semata pada peningkatan produksi saja.

Dengan ditetapkannya arah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan budidaya, maka sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya berdasarkan tujuan yang akan dicapai telah dijabarkan dalam 4 (empat) perspektif dengan masing-masing Indikator Kinerja sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya untuk mengatasi tantangan global dan permasalahan yang menuntut perubahan paradigma dan desain percepatan pembangunan perikanan budidaya.

Berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dibuat sebelumnya. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat diwujudkan.

Terkait dengan kebijakan tersebut Direktorat Rumput Laut, berupaya untuk mendukung kebijakan tersebut melalui pemenuhan target dan sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2024 yang telah dituangkan dalam Penetapan Kinerja 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Tahunan Direktorat Rumput Laut Tahun 2024

Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	%
		2024	2024	
<b>Terserapnya Tenaga Kerja Sektor Perikanan Budi Daya di Bidang Rumput Laut</b>			<b>61,04</b>	
Tenaga Kerja yang Terlibat di Bidang Rumput Laut (orang)	Orang	2.975,00	1.816,00	61,04
<b>Terkelolanya Sistem Perbenihan Ikan yang Berkelanjutan</b>			<b>111,76</b>	
Persentase Bantuan Sarpras UPR/HSRT yang disalurkan ke Masyarakat (persen)	Persen	75	75	100
Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan ke Masyarakat (persen)	Persen	75	192,99	120
Persentase Bantuan Benih Ikan yang Disalurkan ke Masyarakat (persen)	persen	75	97,12	120
Calon Induk Unggul yang Diproduksi (ekor)	Ekor	1.000.000	1.115.699	111,57
Persentase Bantuan Bibit rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat (persen)	persen	75	119	120
Persentase Bantuan Kebun Bibit Rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat (persen)	persen	75	100	120
Modeling Budi Daya Rumput Laut Berbasis Kawasan yang Dibangun (lokasi)	lokasi	2	2	100
Persentase Progres Operasional Pusat Produksi Benih dan Induk Pada 3 Lokasi (persen)	persen	60	65	108,33
<b>Meningkatnya Akses Permodalan dan Jaminan Usaha Bidang Perbenihan</b>			<b>118,3</b>	
Persentase NSPK Bidang Perbenihan yang Disusun (persen)	persen	70	82,81	118,3
<b>Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya Bidang Perbenihan</b>			<b>120</b>	
Persentase Unit Usaha yang mendapatkan Pembinaan CPIB (persen)	persen	50	63,03	120
<b>Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Direktorat Rumput Laut</b>			<b>108,94</b>	
Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Direktorat Rumput Laut (%)	persen	85	89,46	105,25
Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (PM SAKIP) di Direktorat Rumput laut (Nilai)	Nilai	82	82,8	100,98

Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	%
		2024	2024	
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Rumput Laut (%)	persen	80	100	120
Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Direktorat Rumput Laut(%)	persen	94	133,33	120
Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Rumput Laut (%)	persen	80	82,56	103,2
Jumlah Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Terintegrasi KUSUKA (%)	persen	91	97,43	107,07
Nilai Pengawasan Kearsipan Unit Kearsipan Direktorat Rumput Laut (Nilai)	Nilai	75	79,75	106,33
Indeks Layanan Perkantoran Direktorat Rumput Laut (Nilai)	Nilai	80	100	120
Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Rumput Laut (%)	persen	98	99,7	101,73

## 1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja (LKJ) tahun 2024 Direktorat Rumput Laut ini adalah sebagai bahan laporan pertanggung jawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Rumput Laut dan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan terhadap pencapaian target IKU di tahun berikutnya agar pencapaian target tahunan dapat terpenuhi secara sempurna.

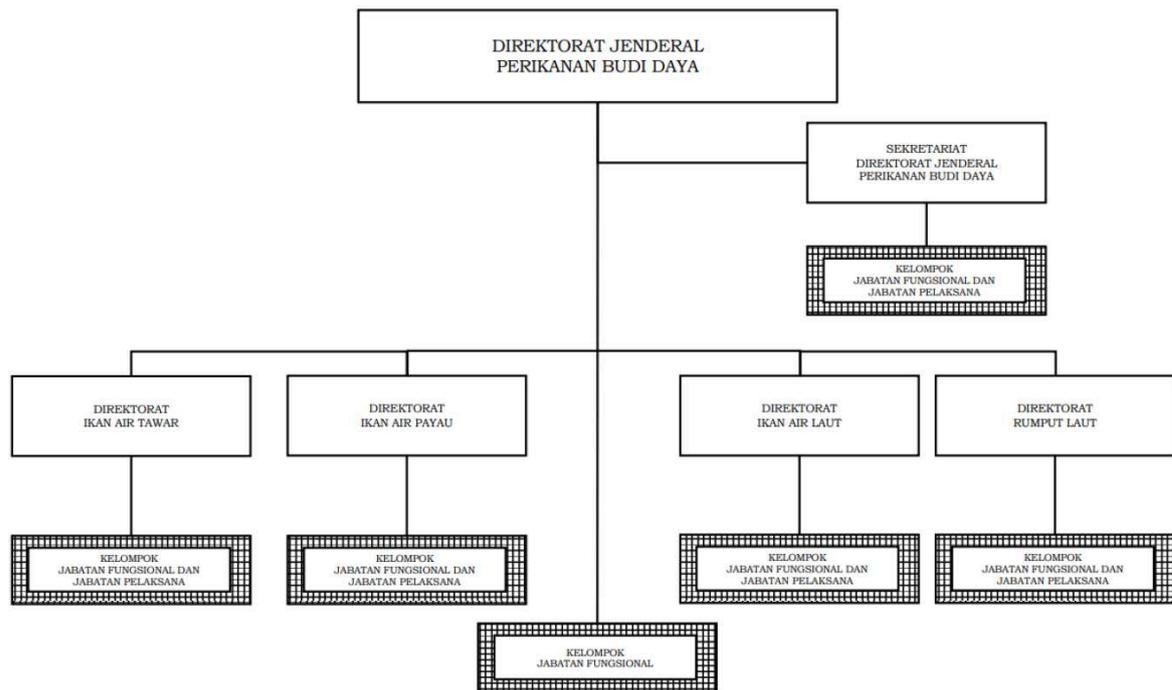
## 1.3. Tugas dan Fungsi

Direktorat Rumput Laut berdasarkan Permen No.5/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan perikanan budi daya pada komoditas rumput laut.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Direktorat Rumput Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma

- nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan pada komoditas rumput laut;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan pada komoditas rumput laut;
  - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan pada komoditas rumput laut;
  - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan pada komoditas rumput laut; dan
  - e. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Rumput Laut.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

#### 1.4. Permasalahan Utama

Secara umum permasalahan/ kendala yang dihadapi dalam Kinerja Direktorat Rumput Laut terutama dalam upaya peningkatan produksi perikanan budidaya adalah isu jaminan keamanan pangan produk yang menjadi tuntutan, baik pasar luar negeri maupun dalam negeri, sehingga pentingnya jaminan bagi unit pembenihan untuk menghasilkan benih yang sehat dan bermutu melalui sertifikasi CPIB. Serta masih kurangnya peran tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan budidaya rumput laut sehingga capaian untuk tenaga kerja tidak tercapai.

#### 1.5. Sistematis Laporan Kinerja (LKj)

Laporan Kinerja (LKJ) ini secara umum memuat target dan capaian kinerja Direktorat Rumput Laut sampai bulan Desember Tahun 2024. Sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja Direktorat Rumput Laut, LKJ ini menginformasikan perbandingan antara target dan capaian kinerja (*performance results*) pada Tahun 2024 dengan target dan kinerja pada tahun sebelumnya. Dari analisa tersebut akan teridentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sehingga dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

Adapun sistematika penyajian laporan adalah sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja Direktorat Rumput Laut pada tahun 2024.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang Ditjen Perikanan Budi Daya serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi Direktorat Rumput Laut termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan LKJ.
3. **Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja**, pada bab ini disajikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran dan kebijakan dan program Ditjen Perikanan Budi Daya pada tahun 2020 - 2024, rencana kerja dan anggaran tahun 2024 serta penetapan kinerja Direktorat Rumput Laut .
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**, pada bab ini disajikan prestasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Rumput Laut serta evaluasi dan analisis kinerja tahun 2024. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang kinerja anggaran.
5. **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan, kegagalan serta permasalahan dan kendala utama. Dalam bab ini juga disampaikan saran pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.
6. **Lampiran**, pada bab ini berisi data dukung yang diperlukan dalam penjelasan/ pembahasan dari Bab I sampai dengan Bab III.

## BAB 2

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. Rencana Strategis (Renstra) Budidaya Tahun 2020-2024

Berdasarkan Rancangan Teknokratis Renstra Perikanan Budidaya 2020-2024, Ditjen Perikanan Budi Daya melaksanakan program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya yang Berkelanjutan. Arah kebijakan pembangunan perikanan budidaya dilakukan dengan mempertimbangkan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial. Fokus kebijakan bertumpu pada 4 aspek, yaitu: (i) teknologi produksi, melalui inovasi teknologi untuk meningkatkan nilai produksi dan nilai tambah; (ii) sosial ekonomi, melalui keterlibatan semua stakeholder dalam peningkatan kesejahteraan pelaku usaha; (iii) keberlanjutan lingkungan, melalui aktivitas perikanan budidaya ramah lingkungan yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan; (iv) berorientasi pasar, artinya perikanan budidaya memproduksi komoditas unggulan yang berorientasi pada permintaan pasar. Pada akhirnya, pembangunan perikanan budidaya diharapkan dapat berperan penting untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, memenuhi ketahanan pangan nasional, dan peningkatan ekspor produk.



Gambar 2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Perikanan Budidaya 2020-2024

Kebijakan pembangunan perikanan budidaya dikelompokkan menjadi tiga kelompok strategi, meliputi Pengelolaan Kawasan Berkelanjutan, Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, dan Peningkatan Kesejahteraan Pembudidaya Ikan. Kelompok strategi tersebut kemudian masing-masing dijabarkan dalam strategi, sebagaimana disajikan pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2. Arah Kebijakan dan Strategi Perikanan Budidaya 2020-2024

## 2.2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Direktorat Rumput Laut sebagai suatu *outcome/ impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis Direktorat Perbenihan/ Direktorat Rumput Laut tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Kampung Budidaya berbasis kearifan lokal;
- b. Terkelolanya perikanan budidaya berkelanjutan;
- c. Meningkatnya kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya bidang perbenihan; dan
- d. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Satker Direktorat Rumput Laut.

Dalam mendukung pelaksanaan kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Direktorat Rumput Laut telah melakukan beberapa langkah strategis, yaitu:

- a. Penetapan sasaran kegiatan (SK) dan indikator kinerja utama (IKU) Direktorat Rumput Laut Tahun 2024 sebagai upaya untuk memantapkan arah kebijakan pada

- Direktorat Rumput Laut selama 1 (satu) tahun, yang dapat diukur atas tingkat ketercapaian kinerja;
- b. Penetapan Perjanjian Kinerja Direktorat Rumput Laut Tahun 2024; dan
  - c. Penyusunan rencana aksi dan evaluasi rencana aksi setiap triwulannya.

### 2.3. Penetapan Kinerja

Sebagai penjabaran dari Rencana Kinerja, maka disusun Perjanjian Kinerja yang memuat mengenai Perjanjian Kinerja antara Direktorat Rumput Laut dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya pada tahun 2024 seperti terlihat dalam gambar 2.3.



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DIREKTORAT RUMPUT LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Nono Hartanto**  
Jabatan : Direktur Rumput Laut  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb Haeru Rahayu**  
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Juli 2024

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

  
Tb Haeru Rahayu

Pihak Pertama  
Direktur Rumput Laut

  
Nono Hartanto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DIREKTORAT RUMPUT LAUT**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terserapnya Tenaga Kerja Sektor Perikanan Budi Daya Bidang Rumput Laut	1.	Tenaga Kerja yang Terlibat di Bidang Rumput Laut (Orang)	2.975
2.	Terkelolanya Sistem Perbenihan Ikan yang Berkelanjutan	2.	Persentase Bantuan Sarpras UPR/HSRT yang disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		3.	Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		4.	Persentase Bantuan Benih Ikan yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		5.	Calon Induk Unggul yang Diproduksi (Ekor)	1.000.000
		6.	Persentase Bantuan Bibit Rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		7.	Persentase Bantuan Kebun Bibit Rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		8.	Modeling Budi Daya Rumput Laut Berbasis Kawasan yang Dibangun (Lokasi)	2
		9.	Persentase Progres Operasional Pusat Produksi Benih dan Induk (Persen)	60
		3.	Meningkatnya Akses Permodalan dan Jaminan Usaha Bidang Perbenihan	10.
4.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya Bidang Perbenihan	11.	Persentase Unit Usaha yang Mendapatkan Pembinaan CPIB (Persen)	50
5.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Direktorat Rumput Laut	12.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Rumput Laut (Persen)	85

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	13. Nilai PM SAKIP di Direktorat Rumput Laut (Nilai)	82
	14. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Rumput Laut (Persen)	80
	15. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Direktorat Rumput Laut (Persen)	94
	16. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas / Strategis Lingkup Direktorat Rumput Laut (Persen)	80
	17. Jumlah Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi KUSUKA (Persen)	91
	18. Nilai Pengawasan Kearsipan Unit Kearsipan Direktorat Rumput Laut (Nilai)	75
	19. Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Rumput Laut (Persen)	80
	20. Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Rumput Laut (Persen)	98

Jakarta, 31 Juli 2024

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Tb Haeru Rahayu

Pihak Pertama  
Direktur Rumput Laut



Nono Hartanto

**DATA ANGGARAN :**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Perbenihan Ikan	38.681.994.000
2.	Dukungan Manajerial	1.200.000.000
<b>Total Anggaran Direktorat Rumput Laut Tahun 2024</b>		<b>39.881.994.000</b>

Jakarta, 31 Juli 2024

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama  
Direktur Rumput Laut



Tb Haeru Rahayu

Nono Hartanto

Gambar 2.3. Perjanjian Kinerja Direktorat Rumput Laut Tahun 2024

#### 2.4. Pengukuran Capaian Kinerja Direktorat Rumput Laut Tahun 2024

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Rumput Laut dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Rumput Laut dengan data pencapaian kerjanya. Metode pengukuran kinerja berpedoman pada manual indikator kinerja dan cara pengukuran kinerja dilakukan dari bawah ke atas. Data yang dimasukkan sebagai pencapaian kinerja harus diverifikasi oleh Tim Kinerja, sebagai data mutakhir yang diambil dari sumber data yang tepat yakni dari unit kerja pemilik kegiatan.

Pengukuran capaian indikator kinerja Direktorat Rumput Laut sampai bulan Desember tahun 2024, menggunakan aplikasi pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik (triwulanan/ semesteran/ tahunan);
2. Pengukuran kinerja dilakukan dari bawah ke atas;
3. Pencapaian kinerja atasan merupakan akumulasi pencapaian kinerja bawahannya;
4. Data yang dimasukkan sebagai pencapaian kinerja merupakan data yang telah diverifikasi oleh Tim Pengelola Kinerja lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya sebagai data mutakhir yang diambil dari sumber data yang tepat; dan juga diukur melalui aplikasi "kinerjaku.kkp.go.id";

5. Status capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ada dalam aplikasi “kinerjaku.kkp.go.id” ditunjukkan dengan warna : (i) merah (untuk indikator yang di bawah batas toleransi); (ii) kuning (untuk indikator dalam batas toleransi); dan (iii) hijau (untuk indikator yang telah/melebihi target).

Pengukuran kinerja berbasis *Balanced Scorecard* dilakukan dengan cara penghitungan capaian terhadap target dengan menggunakan polarisasi *Maximize*, *Minimize*, dan *Stabilize*.

1. *Maximize*

IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize* yaitu IKU yang mempunyai kriteria pencapaian semakin tinggi (dari nilai 100%) semakin baik.

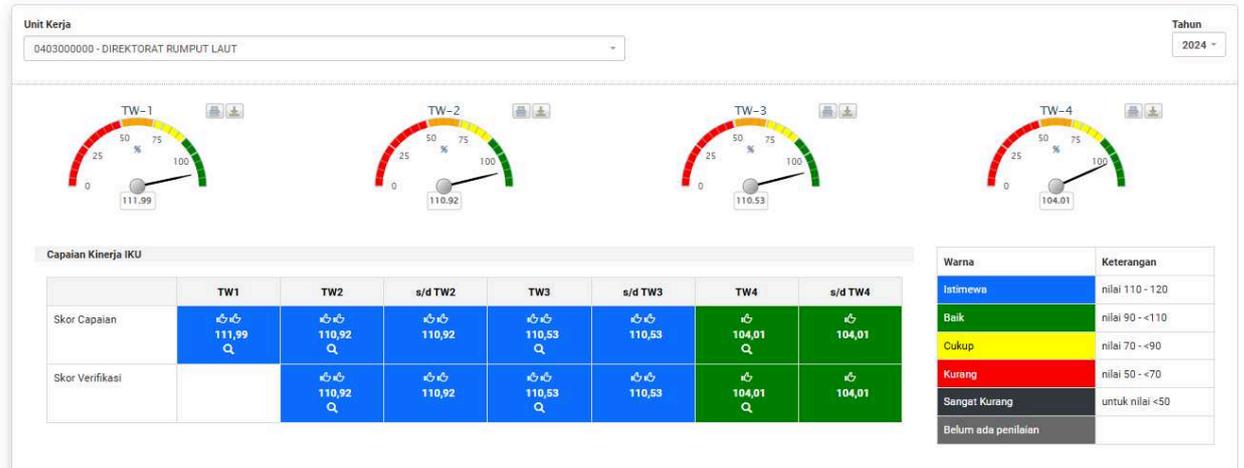
2. *Minimize*

IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *minimize* yaitu IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *minimize* yaitu IKU yang mempunyai kriteria pencapaian semakin rendah (dari nilai 100%) semakin baik.

3. *Stabilize*

IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *stabilize* yaitu IKU yang semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.

Hasil pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja Triwulanan yang didukung dengan penerapan Aplikasi “Kinerjaku”, capaian NKO Direktorat Rumput Laut sampai bulan desember tahun 2024 sebesar 104,01 seperti terlihat dalam gambar 2.4.



Gambar 2.4. Nilai Capaian Kinerja sampai Bulan Desember Tahun 2024

## BAB 3

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas capaian organisasi Direktorat Rumput Laut, yang menjadi indikator utama sebanyak 11 indikator dan 9 indikator kegiatan dengan rincian seperti disajikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1. Capaian Kinerja sampai Desember Tahun 2024 Direktorat Rumput Laut

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET Tahunan 2024	Desember 2024	
				TARGET	CAPAIAN
1	Tenaga Kerja yang Terlibat di Bidang Rumput Laut	orang	2.975	2.975	1.816
2	Persentase Bantuan Sarpras UPR/HSRT yang disalurkan ke Masyarakat	persen	75	75	100
3	Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan ke Masyarakat	persen	75	75	192,99
4	Persentase Bantuan Benih Ikan yang Disalurkan ke Masyarakat	persen	75	75	97,99
5	Calon Induk Unggul yang Diproduksi	ekor	1.000.000	1.000.000	1.115.699
6	Persentase Bantuan Bibit rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat	persen	75	75	119
7	Persentase Bantuan Kebun Bibit Rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat	persen	75	75	100
8	Modeling Budi Daya Rumput Laut Berbasis Kawasan yang Dibangun	lokasi	2	2	2
9	Persentase Progres Operasional Pusat Produksi Benih dan Induk Pada 3 Lokasi	persen	60	60	65
10	Persentase NSPK Bidang Perbenihan yang Disusun	persen	70	70	82,81
11	Persentase Unit Usaha yang mendapatkan Pembinaan CPIB	persen	50	50	63,03
12	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Rumput Laut	persen	85	85	89,46
13	Nilai PM SAKIP di Direktorat Rumput Laut	nilai	82	82	82,8
14	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Rumput Laut	persen	80	80	100
15	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen	persen	94	94	133,33

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET Tahunan 2024	Desember 2024	
				TARGET	CAPAIAN
	Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Direktorat Rumput Laut				
16	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas / Strategis Lingkup Direktorat Rumput Laut	persen	80	80	82,56
17	Jumlah Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi KUSUKA	persen	91	91	97,43
18	Nilai Pengawasan Kearsipan Unit Kearsipan Direktorat Rumput Laut	nilai	75	75	79,75
19	Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Rumput Laut	persen	80	80	100
20	Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Rumput Laut	peren	98	98	99,7

### 3.2. Analisis Kinerja

#### A. Terserapnya tenaga kerja sektor perikanan budi daya yang terlibat dalam bidang rumput laut

##### A.1. Tenaga kerja yang terlibat di bidang rumput laut

Indikator kinerja ini merupakan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam Kegiatan Pengelolaan Rumput Laut pada Direktorat Rumput Laut tahun 2024, baik secara langsung maupun tidak langsung pada kegiatan program prioritas dan bantuan pemerintah.

Pengukuran jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan rumput laut pada Direktorat Rumput Laut merupakan penyesuaian atas Indikator Kinerja pengukuran jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan perbenihan ikan pada Direktorat Perbenihan. Penyesuaian ini dilakukan karena adanya perubahan nomenklatur Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Permen KP No 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP.

Target tenaga kerja mengalami penyesuaian dari target sebesar 11.504 orang yang terdiri dari tenaga kerja langsung sebesar 10.884 orang dan tenaga kerja tidak langsung sebesar 620 orang menjadi sebesar 2.975 orang yang terdiri dari tenaga kerja langsung sebesar 2355 orang dan untuk kegiatan modeling di masing-masing wilayah sebanyak 70 orang untuk tenaga langsung dan tenaga tidak langsung sebesar 310 orang.

Tabel 3.2. Capaian Tenaga kerja yang terlibat di bidang rumput laut

Sasaran Kegiatan : Terserapnya tenaga kerja sektor Perikanan Budi Daya yang terlibat dalam bidang rumput laut									
IKU : Tenaga kerja yang terlibat di bidang rumput laut									
Realisasi 2019-2023					2024			RPJMN 2020-2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2024	% Capaian 2024
-	-	-	-	22.720	2.975	1.816	61,04%	-	-

Capaian yang terlibat dalam kegiatan bantuan pemerintah di bidang rumput laut, hasil identifikasi dan perhitungan data yang ada terlihat dalam tabel 3.2. realisasi jumlah tenaga yang terserap sebesar 1.816 orang atau tercapai 61,04 % dari target 2.975 orang.

Besarnya realiasi jumlah tenaga kerja langsung yang terlibat dibidang rumput laut terdiri dari tenaga yang terlibat dalam kegiatan bantuan bibit RL sebanyak 350 orang dan bantuan KBRL sebanyak 820 orang, bantuan modeling RL di Maluku Tenggara 80 orang dan bantuan Modeling RL di Rote Ndao sebanyak 72 orang.

Sedangkan tenaga kerja tidak langsung yang terlibat dibidang rumput laut sebanyak 369 dari kegiatan bantuan modeling RL di Maluku Tenggara. Tenaga kerja tidak langsung ini berasal beberapa kegiatan yang mendukung kegiatan modeling budidaya rumput laut antara lain:

- a. Kegiatan pemasangan dan setting rumah ikat sebanyak 14 orang yang terdiri dari 11 orang warga local dan 3 orang dari tenaga penyedia.
- b. Kegiatan pembuatan pelampung batok kelapa sebanyak 126 orang yang berasal dari Selayar, Debut, Dunwahan.
- c. Kegiatan pembangunan UPBRL dan bangunan pendukung sebanyak 45 orang
- d. Kegiatan pembuatan pemberat beton sebanyak 62 orang
- e. Kegiatan setting tali di darat sebanyak 65 orang
- f. Kegiatan setting tali di laut sebanyak 20 orang
- g. Kegiatan pelatihan di BPBL Ambon sebanyak 4 orang
- h. Kegiatan pembuatan kapal ketinting sebanyak 6 orang

Tenaga kerja tidak langsung yang terserap untuk kegiatan modeling budidaya rumput laut di Kabupaten Rote Ndao sebanyak 125 orang. Sehingga jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan modeling rumput laut berbasis kawasan sebanyak 646 orang

Jumlah total tenaga kerja yang terlibat di bidang rumput laut belum mencapai target dikarenakan jumlah tenaga kerja (kelompok pembudidaya yang menerima bantuan) lebih sedikit dibandingkan target. Namun jumlah bantuan yang didistribusikan telah mencapai target. Hal ini disebabkan beberapa kelompok pembudidaya mendapatkan bantuan lebih dari 1 paket.

## **B. Terkelolanya sistem perbenihan yang berkelanjutan**

### **B.1. Persentase Bantuan Sarpras UPR/ HSRT yang disalurkan ke Masyarakat**

Kebijakan strategis pembangunan perikanan budi daya yang mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan khususnya untuk peningkatan produksi ikan air tawar, payau, dan laut perlu penyediaan unit pembenihan ikan di daerah pengembangan perikanan budi daya. Pada tahun anggaran 2024, bantuan sarpras UPR dan HSRT yang disalurkan ke masyarakat diberikan di beberapa lokasi Kampung Perikanan Budidaya untuk turut serta dalam mendukung Program Terobosan yang bergerak pada sektor perikanan budidaya.

Tujuan pelaksanaan bantuan adalah untuk meningkatkan produksi benih ikan bermutu di masyarakat karena ketersediaan benih ikan yang dimaksud tidak dapat hanya bergantung pada pemerintah atau perusahaan skala besar. Oleh karena itu, pemenuhan benih ikan bermutu juga membutuhkan peran serta masyarakat agar ketersediaan benih di berbagai daerah dapat terpenuhi.

Bantuan sarpras UPR/ HSRT TA 2024 dilakukan oleh 5 (lima) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perikanan Budi Daya (BBPBAT Sukabumi, BPBAT Sungai Gelam Jambi, BPBAT Mandiangin, BPBAT Tatelu, dan BPBAP Takalar) sebanyak 30 paket di 29 Kabupaten/ Kota dengan wilayah lokasi penyaluran yaitu Sukabumi, Bandung, Purwakarta, Tasikmalaya, Temanggung, Wonosobo, Grobogan, Demak, Merangin, Sungai Penuh, Kuantan Singingi, Kota Pariaman, Kota Lubuk Linggau, Musirawas, Lampung Utara, HS Selatan, HS Tengah, Malinau, Kapuas, Pulang Pisau, Kutai Kertanegara, Sinjai, Gowa, Bulukumba, Minahasa Utara, Pinrang, Enrekang, Maros, dan Soppeng.

Jenis bantuan berupa sarana sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 441 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Unit Pembenihan Rakyat dan Hatchery Tahun Anggaran 2024. Bantuan sarana unit

pembenihan yang diberikan dengan menu yang dapat dipilih sesuai dengan kondisi lapangan atau kebutuhan kelompok penerima bantuan, antara lain: (a) Bentuk Induk dan pakan (induk ikan, pakan induk, pakan benih, dan/ atau larva/ telur); dan (b) Peralatan pendukung (peralatan perikanan, peralatan uji kualitas air, aerasi, wadah pemeliharaan, instalasi air, peralatan resirkulasi, sarana *biosecurity*, instalasi penetasan telur, obat ikan dan vitamin, instalasi penetasan telur). Komoditas ikan yang diberikan disesuaikan dengan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 111 Tahun 2023 tentang Kampung Perikanan Budidaya.

Tabel 3.3. Capaian indikator kinerja bantuan sarpras UPR/ HSRT yang disalurkan ke masyarakat

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan									
IKU : Persentase Bantuan Sarpras UPR/ HSRT yang disalurkan ke Masyarakat									
Realisasi 2019-2023					2024			RPJMN 2020-2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2024	% Capaian 2024
-	-	-	140%	100%	75%	75%	100%	-	-

Dalam rangka penyaluran bantuan sarpras UPR dan HSRT tahun anggaran 2024 DJPB menyalurkan 30 paket bantuan dari 40 proposal yang diverifikasi. Perhitungan realisasi bantuan sarpras UPR/HSRT yang disalurkan ke masyarakat adalah perbandingan antara jumlah bantuan sarana yang disalurkan dengan jumlah bantuan sarana yang diusulkan dari proposal yang terverifikasi, sehingga capaian yang diperoleh yaitu 75%.

Kegiatan Bantuan Sarpras UPR/ HSRT tidak ada dalam RPJMN 2020-2024, sehingga realisasi kegiatan hanya dibandingkan dengan realisasi 5 tahun terakhir atau pada tahun 2022 dan 2023 sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan Ditjen Perikanan Budi Daya. Berdasarkan tabel di atas, realisasi tahun 2023 sama dengan 2024 yaitu 100%, karena realisasi sesuai dengan target. Sementara itu, realisasi tahun 2022 lebih tinggi dari realisasi 2023 dan 2024 yaitu 140%, karena dilakukan optimalisasi anggaran, sehingga realisasi lebih tinggi dari target.

Jumlah proposal yang diverifikasi sebanyak 40 proposal dengan rincian sebagai berikut: (1) BBPBAT Sukabumi: 8 proposal; (2) BPBAT Sei Gelam: 14 proposal; (3) BPBAT Mandiangin: 6 proposal; (4) BPBAT Tatelu: 4 proposal; dan (5) BPBAP Takalar: 8 proposal.

Pagu anggaran kegiatan bantuan sarpras UPR/ HSRT yang disalurkan ke masyarakat setelah revisi sebesar Rp. 1.474.355.000,- dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.364.584.563,- atau 92,55%.

Kegiatan bantuan sarana dan prasarana UPR/ HSRT yang disalurkan ke masyarakat merupakan kegiatan penugasan yang diberikan Dirjen Perikanan Budi Daya kepada Direktorat Rumput Laut setelah berlakunya Permen KP No.5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan tata Kerja KKP (semula Direktorat Perbenihan diubah menjadi Direktorat Rumput Laut). Pada tahun 2025, kegiatan ini akan ditindak lanjuti oleh Direktorat yang bersangkutan sesuai dengan penugasan Dirjen Perikanan Budi Daya.

## **B.2. Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan ke Masyarakat**

Dalam usaha budidaya ikan secara intensif dibutuhkan benih dan induk yang memiliki kualitas baik. Induk yang unggul akan dapat menghasilkan benih ikan yang bermutu pula. Sedangkan dengan melakukan pemeliharaan benih yang bermutu maka proses produksi akan menjadi efektif dan efisien. Program bantuan calon induk merupakan salah satu program prioritas yang ditujukan untuk peremajaan induk-induk yang ada di masyarakat, dimana sasaran bantuan calon induk ini adalah unit-unit pembenihan milik masyarakat maupun balai benih milik pemerintah provinsi atau kabupaten.

Kegiatan bantuan calon induk dilaksanakan oleh 12 Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Direktorat Perbenihan/ Direktorat Rumput Laut lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang memiliki tugas dan fungsi memproduksi calon induk ikan air tawar, payau, dan laut. Target bantuan calon induk yang telah ditetapkan pada tahun 2024 adalah 60.914 ekor dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,-. Jenis calon induk ikan yang dibantu antara lain ikan nila, lele, mas, patin, papuyu, nilem, gabus haruan, udang vanname, bandeng, kakap putih, dan bawal bintang. Adapun rincian target pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis yang mendapatkan penugasan yaitu:

Tabel 3.4. Unit Pelaksana Teknis DJPB yang melaksanakan bantuan calon induk.

No	Unit Pelaksana Teknis	Target (ekor)
1	Direktorat Rumput Laut	25.169
2	BBPBAT Sukabumi	7.742

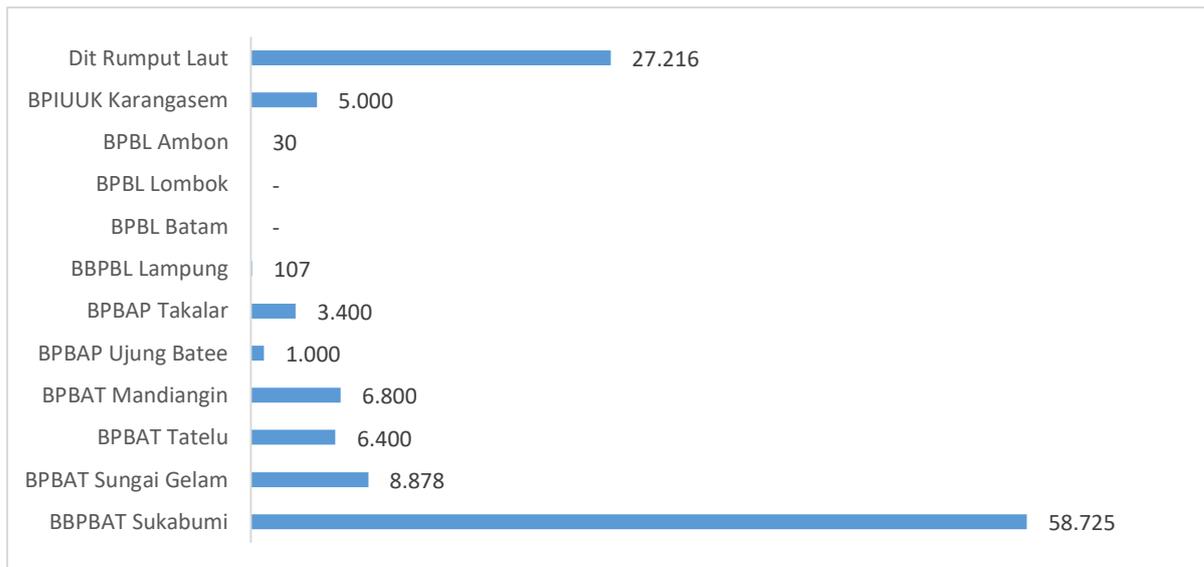
No	Unit Pelaksana Teknis	Target (ekor)
3	BPBAT Sungai Gelam Jambi	6.856
4	BPBAT Mandiangin	6.284
5	BPBAT Tatelu	5.713
6	BPBAP Ujung Batee	805
7	BPBAP Takalar	3.218
8	BPIUUK Karangasem	4.983
9	BBPBL Lampung	32
10	BPBL Ambon	20
11	BPBL Lombok	20
12	BPBL Batam	72
Jumlah Target		60.914

Indikator Kinerja Bantuan Calon Induk ini diukur secara semesteran dengan target 75%, dimana dalam penghitungannya adalah membandingkan antara jumlah calon induk yang direalisasikan dengan hasil verifikasi. Jumlah calon induk yang telah didistribusikan pada tahun 2024 adalah sebanyak 117.556 ekor yang dilaksanakan oleh 12 satuan kerja lingkup DJPB. Capaian IKU bantuan calon induk ikan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5. Capaian IKU Calon induk yang didistribusikan berdasarkan usulan masyarakat.

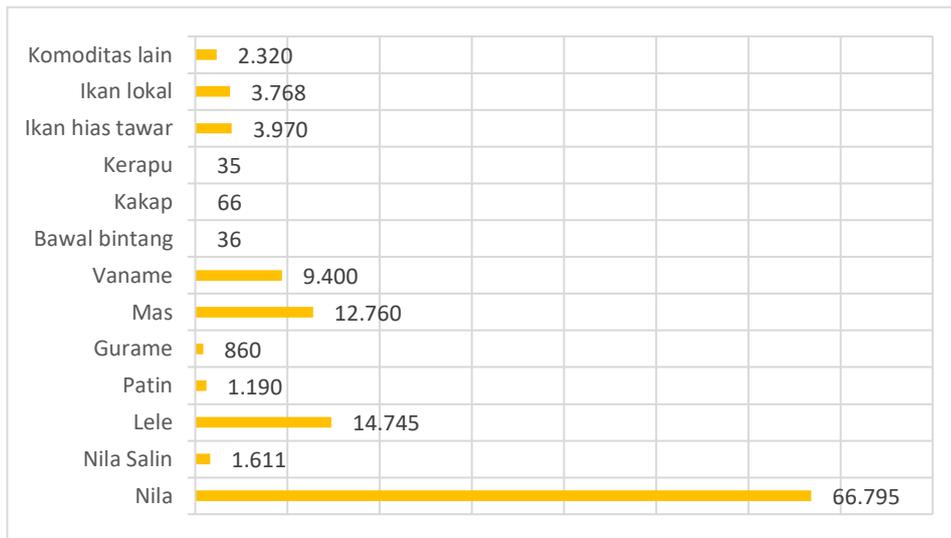
Sasaran Strategis : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan									
Indikator Kinerja : Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan ke Masyarakat									
Realisasi 2019 – 2023					2024			RPJM 2020 - 2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2024	% Capaian 2024 thd target 2024
-	-	-	-	203,43%	75%	192,99%	257,32%	-	-

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2024, realisasi bantuan calon induk terealisasi sebesar 192,99% dari target. Kondisi ini dikarenakan adanya permintaan bantuan dari para pembenih yang disebabkan juga oleh tingginya permintaan benih tebar. Hal ini juga menunjukkan bahwa kualitas calon induk ikan yang diproduksi oleh UPT lingkup DJPB berkualitas baik sehingga masyarakat berminat terhadap bantuan calon induk ikan ini. Bantuan calon induk didistribusikan melalui 12 (dua belas) satker lingkup DJPB, dimana BBPBAT Sukabumi menjadi satker yang paling banyak dalam mendistribusikan bantuan calon induk sebanyak 58.725 ekor, selanjutnya adalah Direktorat Rumput Laut sebanyak 27.216 ekor, dan disusul BPBAT Sungai Gelam sebanyak 8.878 ekor. Realisasi bantuan calon induk pada masing-masing satker terlihat pada grafik berikut.



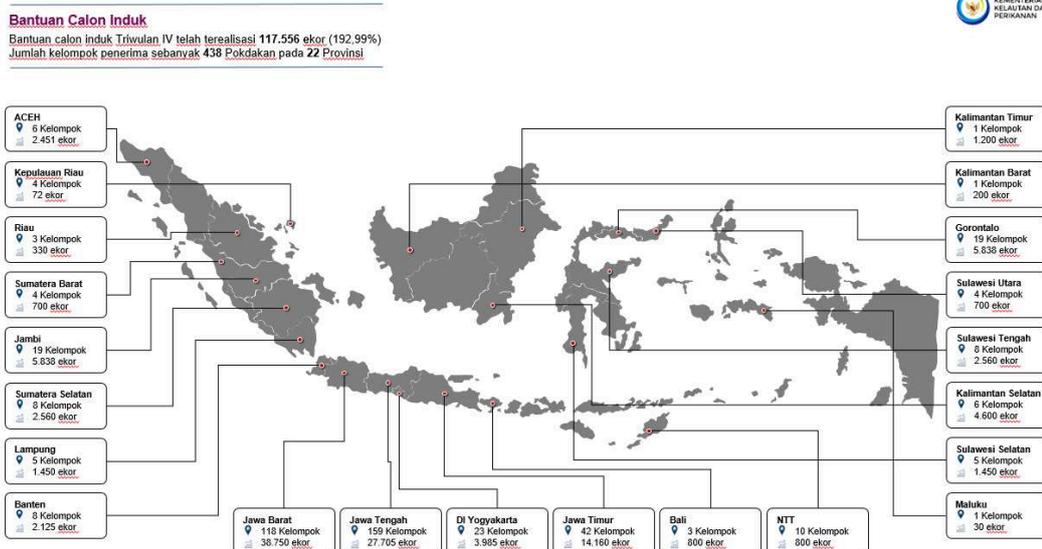
Gambar 3.1. Distribusi bantuan calon induk per satker.

Berdasarkan media hidup, calon ikan air tawar menjadi komoditas yang paling banyak didistribusikan ke masyarakat mencapai 106.408 ekor atau 90,52%. Sedangkan komoditas lain seperti calon induk ikan air payau didistribusikan sebanyak 11.011 ekor atau 9,37% dan calon induk ikan laut hanya sebesar 137 ekor atau 0,12%. Calon induk ikan air tawar menjadi yang terbanyak disebabkan karena komoditas ikan air tawar seperti nila, lele, dan ikan mas memiliki teknologi pembenihan yang telah dikuasai oleh masyarakat dan unit pembenihan rakyat (UPR) telah berkembang dan menyebar di berbagai wilayah di Indonesia. Sedangkan bantuan calon induk udang vaname umumnya diberikan kepada pembudidaya kecil atau *hatchery* skala rumah tangga (HSRT) serta udang adalah komoditas utama dengan volume ekspor tinggi. Sementara itu, pada komoditas ikan laut seperti kerapu, kakap dan bawal bintang tidak banyak yang didistribusikan, karena teknologi pembenihan laut masih belum dikuasai oleh masyarakat dan umumnya adalah perusahaan pembenihan swasta.



Gambar 3.2. Distribusi bantuan calon induk menurut komoditas.

Bantuan calon induk ditujukan bagi para pembenih kecil seperti unit pembenihan rakyat (UPR) atau *hatchery* skala rumah tangga (HSRT) yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan adanya bantuan calon induk yang diberikan kepada mereka, diharapkan akan diperoleh induk yang unggul dan berkualitas sehingga dapat menghasilkan benih yang berkualitas juga. Pada periode tahun 2024, bantuan calon induk tersebut telah terdistribusi kepada 438 pokdakan yang tersebar di 22 provinsi. Sebaran bantuan calon induk terlihat pada peta berikut.



Gambar 3.3. Peta sebaran bantuan calon induk tahun 2024.

### B.3. Persentase Bantuan Benih Ikan yang Disalurkan ke Masyarakat

Dalam rangka mendukung kebijakan strategis pembangunan perikanan budidaya yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui peningkatan produksi perikanan budidaya, perlu dilakukan penyediaan benih ikan, diantaranya melalui program bantuan benih ikan.

Program bantuan benih ikan merupakan salah satu kegiatan prioritas andalan Ditjen Perikanan Budi Daya. Benih ikan merupakan faktor penting dalam kegiatan pembudidayaan ikan, karena pembudidaya ikan kecil masih sangat memerlukan bantuan ikan benih bermutu yang dihasilkan dari induk ikan unggul. Tujuan bantuan benih ikan adalah untuk menstimulus kegiatan budidaya ikan, meningkatkan produktivitas pembudidaya ikan, dan untuk menambah stok sumber daya ikan pada suatu perairan umum.

Pelaksanaan bantuan benih berpedoman pada Keputusan Dirjen Perikanan Budi Daya Nomor 381 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Benih Ikan Tahun Anggaran 2024. Pemberi bantuan benih ikan adalah Direktorat Perbenihan/ Direktorat Rumput Laut (berdasarkan Permen KP No.5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan tata Kerja KKP, semula Direktorat Perbenihan diubah menjadi Direktorat Rumput Laut) dan 11 (sebelas) Satker UPT lingkup Ditjen Perikanan Budidaya, yaitu BBPBAT Sukabumi, BBPBL Lampung, BPBAT Sungai Gelam Jambi, BPBAT Mandiangin, BPBAT Tatelu, BPBAP Ujung Batee, BPBAP Takalar, BPBL Ambon, BPBL Lombok, BPBL Batam, dan BPIUUK Karangasem.

Tabel 3.6. Capaian indikator kinerja persentase bantuan benih ikan yang disalurkan ke masyarakat

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan									
IKU : Persentase Bantuan Benih Ikan yang Disalurkan ke Masyarakat									
Realisasi 2019-2023					2024			RPJMN 2020-2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2024	% Capaian 2024
-	222,93	-	-	114,08 %	75%	97,12%	129,49%	-	-

Bantuan benih bermutu ikan air tawar, payau, laut, udang, dan kepiting yang didistribusikan ke masyarakat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu para pembudidaya skala kecil dan mikro untuk meningkatkan hasil produksi, serta untuk *restocking* ikan lokal di perairan umum dengan tujuan untuk

menjaga sumberdaya genetik dan pemanfaatan produktivitas perairan umum, sehingga berdampak baik pada kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan Bantuan bantuan benih ikan tidak ada dalam RPJMN 2020-2024, sehingga realisasi kegiatan hanya dibandingkan dengan realisasi 5 tahun terakhir atau pada tahun 2020 dan 2023 sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan Ditjen Perikanan Budi Daya. Berdasarkan tabel di atas, realisasi tahun 2020 dan 2023 lebih tinggi daripada 2024 yaitu masing-masing 22,93% dan 114,08%. Hal tersebut karena perbedaan target pada tahun 2023 dan 2024, yaitu masing-masing sebesar 96.849.411 ekor, dan 86.889.630 ekor.

Pada tahun 2024, benih yang telah terdistribusi sebanyak 84.387.884 atau 97,12% ekor dari target 86.889.630 ekor. Realisasi bantuan benih yang disalurkan ke masyarakat pada tahun anggaran 2024 tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.7. Realisasi Bantuan Benih dan Restocking Tahun 2024

No	UPT DJPB	Benih yang Terverifikasi (Ekor)	Benih yang Terdistribusi (Ekor)					Benih yang Terdistribusi (Ekor)	Persentase (%)
			Tawar	Payau	Laut	Udang	Kepiting		
1	DIREKTORAT PERBENIHAN/ DIREKTORAT RUMPUT LAUT	19.676.740	5.636.719	1.910.500	2.000	1.520.000	10.000	9.079.219	46,14
2	BBPBAT SUKABUMI	10.389.046	16.080.255	0	0	0	0	16.080.255	154,78
3	BPBAT SEI GELAM	5.779.024	5.836.500	0	0	0	0	5.836.500	100,99
4	BPBAT MANDIANGIN	3.923.361	4.269.000	0	0	0	0	4.269.000	108,81
5	BPBAT TATELU	4.073.431	4.320.700	0	0	0	0	4.320.700	106,07
6	BPBAP UJUNG BATEE	8.081.492	0	785.400	164.500	7.390.960	0	8.340.860	103,21
7	BPBAP TAKALAR	16.761.396	0	2.083.090	56.000	14.394.540	261.850	16.795.480	100,20
8	BBPBL LAMPUNG	647.000	0	0	660.500	0	0	660.500	102,09
9	BPBL AMBON	541.000	0	0	549.700	0	0	549.700	101,61
10	BPBL BATAM	556.320	0	0	556.500	0	0	556.500	100,03
11	BPBL LOMBOK	343.000	0	0	344.170	0	0	344.170	100,34
12	BPIUUK KARANGASEM	16.117.820	0	0	155.000	17.400.000	0	17.555.000	108,92
	<b>Jumlah</b>	<b>86.889.630</b>	<b>36.143.174</b>	<b>4.778.990</b>	<b>2.488.370</b>	<b>40.705.500</b>	<b>271.850</b>	<b>84.387.884</b>	<b>97,12</b>

Pagu anggaran bantuan benih ikan tahun 2024 sebesar Rp. 27.482.890.000,-. Realisasi belanja barang (benih ikan) sebesar Rp. 14.714.941.625,-, atau 53,54% dari pagu anggaran, sementara anggaran lainnya digunakan untuk belanja perjalanan (dalam rangka identifikasi, verifikasi, dan pemeriksaan).

Dalam pencapaian IKU, kendala yang dihadapi, antara lain: (i) Usulan proposal yang diterima Direktorat Rumput Laut mayoritas di akhir tahun; (ii) Dokumen

Permohonan bantuan tidak lengkap; (iii) Kesiapan lahan penerima bantuan kurang optimal; dsb.

Kegiatan bantuan benih ikan merupakan kegiatan penugasan yang diberikan Dirjen Perikanan Budi Daya kepada Direktorat Rumpun Laut setelah berlakunya Permen KP No.5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan tata Kerja KKP (semula Direktorat Perbenihan diubah menjadi Direktorat Rumpun Laut). Pada tahun 2025, kegiatan ini akan ditindak lanjuti oleh Direktorat yang bersangkutan sesuai dengan penugasan Dirjen Perikanan Budi Daya.

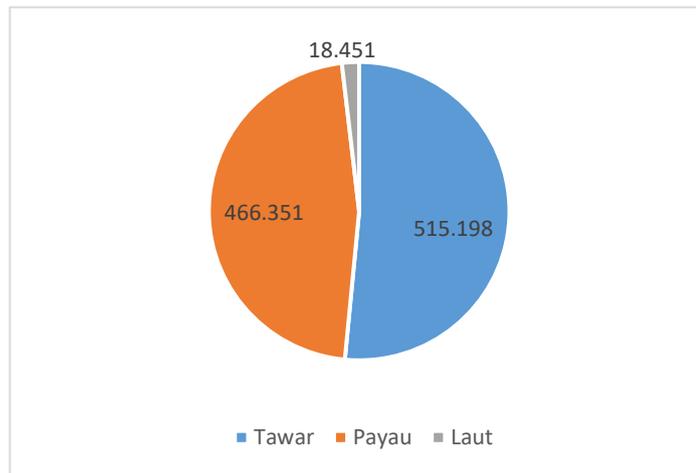
#### B.4. Calon Induk Unggul yang Diproduksi

Penyediaan induk unggul menjadi salah satu tugas pokok bagi unit pelaksana teknis di bawah DJPB. Melalui produksi ini, diharapkan akan memastikan ketersediaan benih bermutu. Pada tahun anggaran 2024, sebanyak 1.000.000 ekor calon induk menjadi target produksi bagi UPT lingkup DJPB dengan alokasi anggaran yang disediakan sebanyak Rp. 40.000.000.000,-. Sedangkan rincian target per UPT tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 3.8. Produksi calon induk unggul

No	Unit Pelaksana Teknis	Target (ekor)
1	BBPBAT Sukabumi	167.638
2	BPBAT Sungai Gelam Jambi	119.901
3	BPBAT Mandiangin	113.690
4	BPBAT Tatelu	80.343
5	BBPBAP Jepara	97.421
6	BPBAP Ujung Batee	54.991
7	BPBAP Situbondo	80.981
8	BPBAP Takalar	79.979
9	BLUPPB Karawang	74.724
10	BPIUUK Karangasem	114.413
11	BBPBL Lampung	4.305
12	BPBL Ambon	4.090
13	BPBL Lombok	3.476
14	BPBL Batam	4.048
	Jumlah Target	1.000.000

Komoditas yang diproduksi sebagai calon induk, terdiri atas beberapa spesies. Pada komoditas ikan air tawar seperti ikan mas, nila, lele, patin, gurami, serta ikan-ikan lokal lainnya. Komoditas ikan air payau, diantaranya adalah udang vanname, udang windu, bandeng, dan kepiting. Sedangkan untuk komoditas ikan laut antara lain kerapu, kakap putih, bawal bintang, bubara dan kobia. Berdasarkan jenis komoditasnya, target produksi calon induk dapat terlihat dalam diagram berikut.



Gambar 3.4. Target produksi calon induk tahun 2024

Pada diagram diatas, target produksi calon induk ikan air tawar sebesar 515.198 ekor (51,5%), calon induk air payau 466.351 ekor (46,6%) dan calon induk laut 18.451 ekor (1,8%). Kegiatan produksi calon induk di UPT lingkup DJPB pada tahun 2024 telah mampu menghasilkan produksi calon induk sebanyak 1.115.699 ekor atau 111,57% dari target. Adapun rinciannya adalah produksi calon induk ikan air tawar 586.393 ekor, calon induk ikan air payau 509.433 ekor, dan calon induk ikan laut 19.873 ekor.

Tabel 3.9. Capaian IKU produksi calon induk tahun 2024.

Sasaran Strategis : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan									
Indikator Kinerja : Produksi calon induk									
Realisasi 2019 – 2023					2024			RPJM 2020 - 2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2024	% Capaian 2024 thd target 2024
1.110.000	-	-	721.573	1.039.749	1.000.000	1.115.699	111,57%	1.000.000	111,57%

Dari tabel diatas, tercatat ada peningkatan produksi calon induk di UPT dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 tercatat produksi calon induk sebesar 721.573 ekor, kemudian meningkat menjadi 1.039.749 ekor pada tahun 2023. Kemudian pada tahun 2024 menjadi 1.115.699 ekor atau meningkat sebesar 7,30% dibandingkan tahun 2023. Rincian realisasi produksi calon induk pada masing-masing UPT DJPB terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10. Target dan produksi calon induk di UPT tahun 2024.

NAMA UPT	TARGET (ekor)	TOTAL (ekor)	% REALISASI
BBPBAT Sukabumi	167.638	193.350	115,34
BPBAT Sungai Gelam	119.901	120.317	100,35
BPBAT Mandiangin	113.690	125.898	110,74
BPBAT Tatelu	80.343	84.947	105,73
BBPBAP Jepara	97.421	99.010	101,63
BPBAP Ujung Batee	54.991	55.200	100,38
BPBAP Situbondo	80.981	89.354	110,34
BPBAP Takalar	79.979	80.459	100,60
BBPBL Lampung	4.305	4.446	103,28
BPBL Batam	4.048	4.880	120,55
BPBL Lombok	3.476	4.042	116,28
BPBL Ambon	4.090	4.191	102,47
BLUP2B Karawang	74.724	119.782	160,30
BPIU2K Karangasem	114.413	129.823	113,47
<b>JUMLAH</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.115.699</b>	<b>111,57</b>

Tabel 3.11. Produksi calon induk berdasarkan komoditas pada tahun 2024.

Calin Ikan Air Tawar		Calin Ikan Air Payau		Calin Ikan Laut	
Jenis	Produksi	Jenis	Produksi	Jenis	Produksi
Nila	350.712	Bandeng	2.606	Bawal Bintang	7.699
Mas	29.995	Nila Salin	10.563	Kakap Putih	6.350
Lele	57.425	Udang Vaname	496.054	Kerapu	939
Patin	55.911	Kepiting/Rajungan	210	Bubara	20
Gurame	10.418			Abalon	1.073
Jelawat	1.650			Tiram Mutiara	1.160
Baung	1.200			Clown Fish	611
Kelabau	300			Bangkai Cardinal Fish	2.021
Papuyu	25.000				
Gabus/ Haruan	12.500				
Belida	100				
Udang Galah	12.633				
Nilem	11.476				
Koi	956				
Koki	769				
Komet	14.704				
Manfish	118				
Kodok Lembu	526				
<b>Jumlah</b>	<b>586.393</b>		<b>509.433</b>		<b>19.873</b>

Rekapitulasi produksi calon induk di UPT terlihat pada tabel diatas, dimana pada produksi calon induk ikan air tawar sebanyak 586.393 ekor. Ikan nila merupakan jenis yang diproduksi paling banyak dibandingkan komoditas calon induk ikan tawar lainnya. Kemudian diikuti oleh calon induk ikan lele sebanyak 57.425 ekor dan ikan patin sebanyak 55.911 ekor. Sedangkan untuk produksi calon induk ikan air payau didominasi oleh udang vaname sebanyak 496.054 ekor. Pada produksi calon induk ikan laut, bawal bintang diproduksi sebanyak 7.699 ekor dan diikuti oleh kakap putih sebanyak 6.350 ekor. Pagu anggaran untuk kegiatan pada IKU calon induk unggul

yang diproduksi adalah sebesar Rp. 40.000.000.000,- dan sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 telah terealisasi sebesar Rp. 39.777.457.672,- atau 98,26%.

### **B.5. Persentase Bantuan Bibit rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat**

Rumput laut menjadi salah satu komoditas unggulan yang telah ditetapkan KKP. Produksi budi daya rumput laut tahun 2022 sebesar 9,23 juta ton yang berkontribusi sebanyak 62,07% dari total produksi perikanan budidaya pada tahun 2022. Sedangkan potensi lahan budidaya rumput laut di Indonesia adalah 175.967 ha. Jenis rumput laut yang dibudi dayakan yaitu *Kappaphycus alvarezii* (Cottoni), *Kappaphycus striatus* (sakol), *Spinosum sp*, dan *Caulerpa sp*.

Permasalahan dalam pengembangan industri rumput laut adalah keterbatasan bibit rumput laut yang berkualitas, tahan penyakit, cepat tumbuh dan selalu tersedia sepanjang musim. DJPB melalui unit pelaksana teknisnya telah mengembangkan bibit rumput laut kultur jaringan yang memiliki daya tahan terhadap kondisi lingkungan yang lebih baik serta laju pertumbuhan yang relatif cepat. Produksi bibit rumput laut kultur jaringan dilaksanakan di laboratorium kultur jaringan rumput laut di 6 (enam) UPT DJPB yaitu BBPBL Lampung, BBPBAP Jepara, BPBAP Situbondo, BPBAP Takalar, BPBL Lombok, dan BPBL Ambon. Diharapkan melalui produksi bibit rumput laut kultur jaringan yang telah diproduksi dari UPT akan dapat menyediakan bibit rumput laut yang berkualitas bagi pembudidaya rumput laut.

Persentase bantuan bibit rumput laut diukur berdasarkan jumlah bibit yang disalurkan berbanding dengan jumlah usulan bibit rumput laut yang terverifikasi.

Tabel 3.12. Capaian indikator kinerja bantuan Bibit Rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat

Sasaran Kegiatan : Terkelolanya Sistem Perbenihan Ikan yang Berkelanjutan									
IKU : Persentase Bantuan Bibit Rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat									
Realisasi 2019-2023					2024			RPJMN 2020-2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2024	% Capaian 2024
-	-	-	-	-	75%	119 %	158,68%	-	-

Perhitungan realisasi bantuan bibit rumput laut yang disalurkan ke masyarakat adalah perbandingan antara jumlah bantuan bibit rumput laut yang disalurkan dengan jumlah bantuan bibit rumput laut yang diusulkan dari proposal yang terverifikasi,

sehingga capaian yang diperoleh yaitu 119% dari target per tahun 75% bantuan yang terealisasi.

Capaian Persentase bantuan bibit rumput laut yang disalurkan ke Masyarakat pada Triwulan 4 tahun 2024 yakni 119% atau sebanyak 31.300 Kg dari target tahunan sebanyak 26.300 Kg. Kelompok penerima bantuan bibit rumput laut berlokasi di Nunukan, Karimunjawa, Banyuwangi, Sumenep, Klungkung, Serang, Lampung, Lingga, Kepri, Luwu, Bantaeng, Morowali, Parigi Moutong, Maluku, Maluku Utara, Wakatobi, Kab. Kupang, Rotendao, Sumba Timur, dan Sumbawa.

Pagu anggaran kegiatan bantuan bibit rumput laut yang disalurkan ke masyarakat sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan realisasi pada periode triwulan IV sebesar Rp 817.414.975,- atau 81,74%.

#### **B.6. Persentase Bantuan Kebun Bibit Rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat**

Rumput laut menjadi salah satu komoditas unggulan yang telah ditetapkan KKP. Produksi budidaya rumput laut tahun 2022 sebesar 9,23 juta ton yang berkontribusi sebanyak 62,07% dari total produksi perikanan budidaya pada tahun 2022. Sedangkan potensi lahan budidaya rumput laut di Indonesia adalah 175.967 ha. Jenis rumput laut yang dibudidayakan yaitu *Kappaphycus alvarezii* (Cottoni), *Kappaphycus striatus* (sakol), *Spinosum sp*, dan *Caulerpa sp*.

Salah satu permasalahan dalam budidaya rumput laut keterbatasan bibit dan sarana pemeliharaannya. Kualitas bibit rumput laut akan mempengaruhi hasil produksi akhirnya. Masyarakat pembudidaya rumput laut saat ini kesulitan dalam memperoleh bibit rumput laut, serta sarana pemeliharaan bibit yang standar. Oleh karena itu, DJPB menyediakan program bantuan kebun bibit rumput laut bagi para pembudidaya rumput laut untuk dapat membantu menyiapkan dan menyediakan bibit di sentra budidaya rumput laut di wilayahnya.

Bantuan kebun bibit rumput laut yang didistribusikan ke masyarakat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu para pembudi daya untuk meningkatkan hasil produksi, serta untuk meregenerasi rumput laut yang ada di pembudidaya dengan generasi yang lebih muda sehingga berdampak baik pada kualitas mutu rumput laut dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.13. Capaian indikator kinerja persentase bantuan kebun bibit rumput laut yang disalurkan ke masyarakat

Sasaran Kegiatan : Terkelolanya Sistem Perbenihan Ikan yang Berkelanjutan									
IKU : Persentase Bantuan Kebun Bibit Rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat									
Realisasi 2019-2023					2024			RPJMN 2020-2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2024	% Capaian 2024
-	-	-	-	-	75%	100 %	133,33%	-	-

Dalam rangka penyaluran bantuan bibit rumput laut tahun 2024, telah dilaksanakan verifikasi yang dilakukan oleh UPT lingkup DJPB penanggung jawab bantuan kebun bibit rumput laut dengan target 90 paket per tahun. Berdasarkan tabel diatas, telah terealisasi atau terdistribusi bantuan kebun bibit rumput laut sebanyak 90 paket.

Perhitungan realisasi bantuan kebun bibit rumput laut yang disalurkan ke masyarakat adalah perbandingan antara jumlah bantuan kebun bibit rumput laut yang disalurkan dengan jumlah bantuan kebun bibit rumput laut yang diusulkan dari proposal yang terverifikasi, dengan capaian yang diperoleh yaitu 100% dari target per tahun 75% bantuan yang terealisasi. Pagu anggaran bantuan kebun bibit rumput laut sebesar Rp. 4.950.000.000,- Realisasi keuangan tahun 2024 yang disalurkan ke masyarakat sebesar Rp. 4.950.000.000,-.

### **B.7. Modeling Budi Daya Rumput Laut Berbasis Kawasan yang Dibangun**

Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode tahun 2021-2024 mencanangkan 5 Program Terobosan. Dalam implementasi program terobosan tersebut, Ditjen Perikanan Budi Daya fokus pada 2 program yaitu: 1) pengembangan perikanan budidaya berorientasi ekspor dengan komoditas unggulan, antara lain: udang, lobster, kepiting, dan rumput laut; dan 2) pembangunan Kampung Perikanan Budidaya berbasis kearifan lokal untuk pengentasan kemiskinan sekaligus menjaga kepunahan.

Rumput laut merupakan salah satu komoditas potensial untuk dikembangkan mengingat permintaan pasar yang tinggi serta metode budidaya yang sederhana. Permintaan rumput laut yang besar dikarenakan perannya yang sangat penting dalam berbagai produk yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, baik melalui pengolahan sederhana yang langsung dapat dikonsumsi, maupun melalui

pengolahan yang lebih kompleks, seperti produk farmasi, kosmetik, dan pangan, serta produk lainnya.

Pada tahun 2020, Indonesia adalah negara produsen rumput laut terbesar kedua di dunia dengan volume 9,6 juta ton setelah China (20,8 juta ton) sementara urutan ketiga dan keempat adalah Korea Selatan (1,7 juta ton) dan Filipina (1,4 juta ton) (FAO, 2022). Produksi ini masih bisa ditingkatkan karena Indonesia memiliki potensi area budidaya laut yang cukup besar yaitu ±12 juta ha, serta iklim tropis yang mendukung untuk budidaya rumput laut. Dengan demikian tingkat pemanfaatan lahan budidaya Rumput laut baru masih rendah. Untuk mewujudkan peningkatan produksi rumput laut diperlukan pendekatan untuk menyediakan budidaya berbasis kawasan yang dibangun bagi masyarakat, yang bertujuan agar system logistic bibit rumput laut dapat lebih efektif dan efisien, terintegrasi dan komprehensif dapat memenuhi kebutuhan rumput laut pada suatu wilayah regional. Pengembangan kawasan budidaya rumput laut di tahun 2024 akan dilakukan di Propinsi Maluku dan Nusa Tenggara Timur mengingat kedua Propinsi tersebut merupakan salah satu penghasil rumput laut terbesar di Indonesia.

Berdasarkan Permen KP No. 111 Tahun 2023 tentang Kampung Perikanan Budidaya, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Rote Ndao telah ditetapkan sebagai salah satu Kampung Perikanan Budidaya Rumput Laut. Kabupaten Maluku Tenggara merupakan salah satu produsen rumput laut terbesar di Provinsi Maluku setelah Kota Tual. Namun demikian dari potensi yang ada, pemanfaatannya baru 781,6 ha (sekitar 11%) di Kei Kecil dan 64,7 ha (sekitar 8%) di Kei Besar. Sementara itu Kabupaten Rote Ndao yang terletak di Nusa Tenggara Timur memiliki potensi budidaya rumput laut seluas 32.000 Ha dan baru termanfaatkan sebanyak 2.124 Ha. Pengukuran capaian atas indikator ini adalah dengan melihat progres pelaksanaan kegiatan di 2 lokasi modeling budidaya rumput laut berbasis kawasan ini.

Tabel 3.14. Capaian indikator kinerja modeling budi daya rumput laut berbasis kawasan yang dibangun

Sasaran Kegiatan : Terkelolanya Sistem Perbenihan Ikan yang Berkelanjutan		
IKU : Modeling Budi Daya Rumput Laut Berbasis Kawasan yang Dibangun		
Realisasi 2019-2023	2024	RPJMN 2020-2024

2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2024	% Capaian 2024
-	-	-	-	1	2	2	100%	-	-

Pengembangan modeling budi daya rumput laut yang dilaksanakan pada tahun 2024 bertempat di Kab. Rote Ndao dan Maluku Tenggara dengan mengacu pada kegiatan modeling budi daya rumput laut yang telah dilaksanakan di Kab. Wakatobi pada tahun 2023. Bantuan pengembangan modeling budi daya rumput laut meliputi sarana dan prasarana perahu ketinting, mesin ketinting, kebun starter, kebun bibit rumput laut (KBRL), dan pembesaran budi daya rumput laut (BRL). Kemudian untuk mendukung produksi bibit rumput laut kultur jaringan meliputi unit produksi bibit rumput laut kultur jaringan (UPBRL), peralatan dan bahan laboratorium, dan kendaraan roda tiga.

### **Analisa**

#### a. Kab. Rote Ndao

Progres pekerjaan pembangunan modeling budi daya rumput laut yang telah dilaksanakan tahun 2024, yaitu :

- Telah dilakukan pekerjaan perencanaan meliputi Feasibility study (Studi kelayakan), penyusunan masterplan, dan penyusunan Detail Engineering Design (DED) Unit Produksi Bibit Rumput Laut (UPBRL) kultur jaringan;
- Telah dilakukan pengadaan kendaraan roda tiga, perahu ketinting, sarana modeling budi daya rumput laut (kebun starter, KBRL, BRL, dan Buoy penanda) dan mesin ketinting;
- Telah dilakukan pengadaan meliputi peralatan dan bahan pendukung operasional laboratorium;
- Bantuan sarana di laut telah telah beroperasi dan dimanfaatkan oleh kelompok pembudi daya.

#### b. Kab. Maluku Tenggara

Progres pekerjaan pembangunan modeling budi daya rumput laut yang telah dilaksanakan tahun 2024, yaitu :

- Telah dilakukan pekerjaan perencanaan meliputi Feasibility study (Studi kelayakan), penyusunan masterplan, dan penyusunan Detail Engineering Design (DED) Unit Produksi Bibit Rumput Laut (UPBRL) kultur jaringan;

- Telah dilakukan pengadaan kendaraan roda tiga, perahu ketinting, sarana modeling budi daya rumput laut (kebun starter, KBRL, BRL, dan Buoy penanda) dan mesin ketinting;
- Telah dilakukan pengadaan meliputi peralatan dan bahan pendukung operasional laboratorium;
- Bantuan sarana di laut telah telah beroperasi dan dimanfaatkan oleh kelompok pembudi daya;

Perhitungan realisasi modeling budi daya rumput laut berbasis kawasan tahun 2024 adalah jumlah lokasi modeling budi daya rumput laut di Kab. Rote Ndao dan Kab. Maluku Tenggara. Pagu anggaran modeling budi daya rumput laut berbasis kawasan sebesar Rp. 33.100.000.000,-, dengan realisasi keuangan tahun 2024 yang sebesar Rp. 24.637.119.976, atau persentase serapan realisasi keuangan sebesar 74,43%.

Kendala yang dihadapi yakni (i) kurangnya ketersediaan modal penyedia, (ii) keterbatasan tenaga kerja, (iii) manajemen perusahaan penyedia yang kurang bagus, (iv) kondisi sosial penerima bantuan dan masyarakat setempat lainnya, serta (v) cuaca.

Rencana tindak lanjut tahun 2025, yaitu adalah melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi kegiatan modeling di Maluku Tenggara maupun di Rote Ndao.

## **B.8. Persentase Progres Operasional Pusat Produksi Benih dan Induk**

Pembangunan Pusat Produksi Benih dan Induk merupakan pembangunan sarana dan prasarana produksi calon induk dan benih ikan yang merupakan kegiatan *multi-years*.

Pusat produksi benih dan induk berada di 3 (tiga) lokasi, yaitu Kab Mesuji (Prov. Lampung), Kab Musirawas (Prov. Sumatera Selatan), dan Kab Dharmasraya (Prov. Sumatera Barat).

### a) Kab Mesuji

Pada tahun 2024, BBPBAT Sukabumi mendapatkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan pembangunan dan operasional Pusat Produksi Benih dan Induk yang

terletak di Desa Buko Poso, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung.

b) Kab Dharmasraya

Pada tahun 2024, BPBAT Sungai Gelam-Jambi mendapatkan alokasi anggaran untuk pembangunan lahan *Broodstock Center* (BC) yang terletak di Nagari Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat.

c) Kab Musirawas

Pada tahun 2024, BPBAT Sungai Gelam-Jambi mendapatkan alokasi anggaran untuk pembangunan lahan *Broodstock Center* (BC) yang terletak di Desa Babat, Kecamatan STL Terawas, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 3.15. Capaian indikator kinerja progres operasional pusat produksi benih dan induk pada 3 lokasi

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan									
IKU : Terbangunnya prasarana dan sarana pusat produksi benih dan induk									
Realisasi 2019-2023					2024			RPJMN 2020-2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2024	% Capaian 2024
-	-	-	-	55 %	60%	65%	108,33%	-	-

Kegiatan terbangunannya prasarana dan sarana pusat produksi benih dan induk ikan tidak ada dalam RPJMN 2020-2024, sehingga realisasi kegiatan hanya dibandingkan dengan realisasi 5 tahun terakhir. Pembangunan pusat produksi dan benih ikan baru mulai dilakukan pembangunan tahun 2023, realisasi pembangunan prasarana dan sarana mengalami peningkatan yaitu 55% pada tahun 2023, menjadi 65% pada tahun 2024. Analisa realisasi adalah sebagai berikut:

a. Analisa

i. Kabupaten Mesuji

Progres operasional pusat produksi benih dan induk di Kab Mesuji tahun 2024, yaitu:

- Pekerjaan yang telah dilakukan pada tahun 2024, antara lain: (i) Pelaksanaan pematangan lahan; (ii) Pembangunan gudang pakan; (iii) Pembangunan ruang blower; (iv) Pembangunan ruang genset; (v) Pembangunan pagar blok F; (vi) Pembangunan pagar blok G; (vii) Pembangunan rumah jaga; dan (viii) Kolam bulat budidaya ikan.

- Persentase capaian sebesar 50%, karena unit pembenihan telah memiliki sarana produksi minimal (kolam induk, unit pemeliharaan larva, dan unit pendederan benih), dan sudah terdapat minimal 1 fasilitas pemeliharaan induk/ benih, dan sudah melakukan pemeliharaan induk/ benih
- Pada tahun 2024, pembangunan fisik Pusat Produksi Benih dan Induk di Mesuji telah dilaksanakan 100%, sementara realisasi anggaran sebesar Rp12.808.746.642,00 atau 97,04% dari pagu anggaran setelah revisi senilai Rp13.199.800.000,00.

## ii. Kab Dharmasraya

Progres operasional *Broodstock Center* di Kab Dharmasraya tahun 2024, yaitu:

- Pekerjaan yang telah dilakukan pada tahun 2024, antara lain: (i) Pembangunan kolam tandon air; (ii) Pembangunan saluran inlet dan outlet; (iii) Perapihan pematang kolam; (iv) Pengecoran jalan produksi; dan (v) Pembuatan pintu air.
- Persentase capaian sebesar 65%, karena unit pembenihan memiliki sarana produksi berupa kolam induk, unit pemeliharaan larva, unit pendederan benih, fasilitas pemeliharaan induk/ benih dan sudah mampu memproduksi benih
- Pada tahun 2024, realisasi pembangunan fisik sudah mencapai 100%, sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 894.215.575.

## iii. Kab Musirawas

Progres operasional *Broodstock Center* di Kab Musirawas tahun 2024, yaitu:

- Pekerjaan yang telah dilakukan pada tahun 2024, antara lain: (i) Pembangunan kantor; (ii) Pembangunan rumah dinas; (iii) Pengecoran jalan produksi; dan (iv) Monitoring.
- Persentase capaian sebesar 80%, karena unit pembenihan memiliki sarana produksi dan sarana pendukung berupa gudang pakan/peralatan serta biosekuriti yang baik dan mampu produksi benih.
- Realisasi pembangunan fisik sudah mencapai 100%, sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 856.482.016.

Tindak lanjut kegiatan pembangunan Pusat Produksi Benih dan Induk di 3 lokasi disesuaikan dengan arahan Dirjen Perikanan Budi Daya terhadap pelaksana kegiatan di tahun 2025.

## **C. Meningkatnya Akses Permodalan dan Jaminan Usaha Bidang Perbenihan**

### **C.1. Persentase NSPK Bidang Perbenihan yang Disusun**

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang selanjutnya disebut NSPK adalah petunjuk atau pedoman untuk melaksanakan suatu kegiatan. Sehingga NSPK bidang perbenihan merupakan suatu petunjuk atau pedoman untuk pelaksanaan kegiatan bidang perbenihan ikan.

Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan kegiatan bidang perbenihan ikan. Standar merupakan acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan kegiatan perbenihan ikan. Standar adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan kegiatan bidang perbenihan ikan. Sedangkan kriteria merupakan ukuran yang dipergunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan kegiatan perbenihan ikan.

Sesuai dengan Rencana Strategis DJPB tahun 2020 – 2024 telah ditargetkan sebanyak 64 NSPK bidang perbenihan yang diterbitkan. Namun hingga tahun 2023, baruterdaftar sebanyak 45 NSPK atau 70,31%. Beberapa hal yang menyebabkan belum tercapainya keseluruhan NSPK sesuai Renstra antara lain adanya kebijakan *automatic adjustment* yang menyebabkan beberapa forum terkait penyusunan NSPK bidang perbenihan tidak dapat dilaksanakan.

NSPK bidang perbenihan menjadi penting, karena menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perbenihan ikan. Beberapa penyusunan NSPK bidang perbenihan yang direncanakan pada tahun 2024 antara lain petunjuk teknis bantuan pemerintah lingkup kegiatan pengelolaan perbenihan ikan, penyusunan Rancangan SNI bidang perbenihan, dan hasil rumusan forum perbenihan ikan nasional.

Indikator kinerja ini mengukur jumlah rekomendasi kebijakan berupa penerbitan NSPK atau kebijakan-kebijakan lain terkait bidang perbenihan ikan pada tahun 2024 dibandingkan terhadap target rekomendasi kebijakan bidang perbenihan tahun 2020 – 2024.

Tabel 3.16. Capaian Persentase NSPK Bidang Perbenihan yang Disusun

Sasaran Strategis : Meningkatnya Akses Permodalan dan Jaminan Usaha Bidang Perbenihan									
Indikator Kinerja : Persentase NSPK Bidang Perbenihan yang Disusun									
Realisasi 2019-2023					2024			RPJMN 2020-2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2025	% capaian 2023 thd target 2024
-	-	-	-	-	70%	82,81 %	118,30 %	-	-

Berdasarkan tabel dan hasil perhitungan di atas, realisasi NSPK tahun anggaran 2024 yaitu 1 dokumen rumusan forum jejaring perbenihan nasional, 6 (enam) judul SNI dan 1 laporan penilaian jenis ikan baru yang akan dibudidayakan.

Sehingga pada tahun 2024 telah tercapai 53 dokumen dengan presentase 82,21 % dari target 64 dokumen. Target tahunan dari realisasi NSPK yang disusun pada tahun anggaran 2024 sebesar 70%, sehingga realisasi terhadap target 2024 sebesar 118,30 %.

Indikator kinerja ini diukur secara tahunan. NSPK bidang perbenihan yang disusun tahun 2024 adalah rumusan Kegiatan Forum Jejaring Perbenihan Nasional, Penilaian Jenis Ikan Baru yang akan dibudidayakan, dan RSNI 3 Perikanan Budidaya Bidang Perbenihan, dengan rincian sebagai berikut:

**1). Kegiatan Forum Jejaring Perbenihan Nasional**

Kegiatan forum jejaring perbenihan nasional telah diselenggarakan pada hari Kamis s.d. Sabtu tanggal 2-4 Mei 2024 di Hotel Golden Boutique Kemayoran, Jakarta. Adapun hasil Forum Jejaring Perbenihan Nasional tahun 2024 antara lain:

- a. Dalam rangka mendukung program revitalisasi tambak Pantura Jawa seluas 78.550 hektar, diperlukan dukungan penyediaan 700 ribu ekor induk dan 4,7 miliar benih.
- b. Diperlukan penyusunan *roadmap* dalam rangka penyediaan produksi induk unggul dan benih bermutu nila salin.
- c. Diperlukan benih yang memenuhi standar hasil produksi (Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Nasional Indonesia (SNI)) oleh para produsen benih, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pembudi daya nila salin di tambak, baik dari aspek kualitas dan kuantitas.
- d. Memperbanyak induk unggul baru melalui pemuliaan dan mendorong induk hasil pemuliaan untuk diajukan pelepasan (release) sesuai prosedur ketentuan peraturan yang berlaku.
- e. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap induk dan benih nila pasca pelepasan (release) yang bertujuan untuk memastikan performance, ketersediaan, dan distribusi.
- f. BRIN dan Perguruan Tinggi bersinergi dengan rencana program revitalisasi tambak Pantura Jawa untuk pengembangan teknologi pembenihan dan pembesaran untuk kegiatan budi daya nila salin.

- g. Pemerintah Daerah mendorong unit pembenihan di wilayahnya untuk menjadi anggota jejaring perbenihan, khususnya komoditas nila, serta menerapkan prinsip-prinsip Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB).
- h. Komitmen peserta forum yang hadir, yaitu : Meningkatkan produksi benih nila untuk mendukung budi daya nila salin di Pantura Jawa; Meningkatkan sinergitas antara produsen induk, benih, dan pembudi daya nila; Menjadikan Forum Jejaring Perbenihan sebagai ajang komunikasi bagi para produsen induk dan benih nila.

## **2). Penilaian Jenis Ikan Baru yang Akan Dibudidayakan**

Berdasarkan Permen KP Nomor 21 tahun 2021 tentang Jenis Ikan Baru yang akan Dibudidayakan maka setiap jenis ikan baru yang diproduksi oleh pemulia ikan harus mendapat ketetapan dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Guna memperoleh penetapan ini perlu dilakukan penilaian atas kualitas ikan baru yang akan dibudidayakan tersebut.

Dalam rangka pelaksanaan penilaian terhadap jenis ikan baru yang akan dibudidayakan perlu penetapan keputusan Menteri KP yang digunakan sebagai dasar melaksanakan penilaian terhadap ikan yang akan dibudidayakan. Penetapan keputusan Menteri KP ini merupakan perbaruan dari Keputusan Menteri KP Nomor 66 Tahun 2023 tentang Tim Penilai Jenis Ikan Baru yang Akan Dibudidayakan yang memiliki masa kerja hingga tanggal 31 Desember 2023. Pada triwulan II telah disahkan Kepmen KP Nomor 44 Tahun 2024 pada tanggal 11 Juni 2024 tentang Tim Penilai Jenis Ikan Baru Yang Akan Dibudidayakan.

Pada triwulan III yaitu Hari Rabu-Jumat tanggal 30 Juli – 2 Agustus 2024 bertempat di The Mirah Hotel, Jl. Pangrango No. 9A Kecamatan Bogor Tengah, Bogor, Jawa Barat telah dilakukan penilaian usulan jenis ikan baru yang akan dibudidayakan. Terdapat 3 jenis ikan baru yang dilakukan penilaian pada tahun ini yaitu:

- a. Ikan Nila Aquafarm Nusantara (Nila AN) yang dihasilkan oleh PT Aqua Farm Nusantara dengan hasil: Lulus
- b. Ikan Red Marine Tilapia yang dihasilkan oleh PT Central Proteina Prima Tbk dengan hasil: Lulus
- c. Ikan Black Marine Tilapia yang dihasilkan oleh PT Central Proteina Prima Tbk

dengan hasil: Tidak Lulus

Dari ketiga jenis ikan yang diajukan untuk penilaian ini semuanya diproduksi oleh swasta. Dalam hal ini KKP menyambut baik keterlibatan pihak swasta/masyarakat dalam memproduksi induk unggul. Mengingat saat ini kegiatan terkait penelitian untuk memproduksi induk unggul sudah tidak ada lagi di KKP, sedangkan hasil penilaian oleh Tim Penilai Jenis Ikan Baru yang Akan Dibudidayakan terdapat beberapa masukan untuk perbaikan naskah akademik. Saat ini telah disampaikan perbaikan naskah akademik untuk Ikan Nila Aquafarm Nusantara (Nila AN) dan Ikan Red Marine Tilapia. Sedangkan untuk Ikan Black Marine Tilapia disepakati belum diusulkan tahun ini karena masih banyak data yang perlu dilengkapi.

Pada triwulan IV, perbaikan naskah akademik Ikan Nila AN telah diajukan pada tanggal 25 November 2024 oleh Direktur Rumput Laut selaku Ketua Tim Penilai ke Sekretariat DJPB untuk selanjutnya diusulkan menjadi draft Kepmen KP. Sedangkan naskah akademik Ikan Red Marin Tilapia masih proses perbaikan.

### **3). Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI)**

Pada triwulan I telah dikeluarkan Keputusan Badan Standardisasi Nasional Nomor 70/KEP/BSN/3/2024 tentang Program Nasional Perumusan Standar untuk dapat dilakukan pembahasan bersama BSN dan komite teknis 65-07 Perikanan Budidaya.

Pada triwulan II telah dilaksanakan pembahasan RSNI 1 pada tanggal 19-21 Juni 2024 di Onih Hotel dengan hasil akhir berupa RSNI 2. Terdapat 6 judul yang dibahas yaitu:

- a. Induk Udang Penaeid
- b. Benih Udang Penaeid
- c. Produksi benih Udang Penaeid
- d. Benih Bening Lobster
- e. Induk Ikan Kuwe
- f. Benih Ikan Kuwe

Selain itu, telah dilakukan Rapat Konsensus RSNI-3 Bidang Perbenihan dan Kaji Ulang SNI oleh Komite Teknis 65-07 Perikanan Budidaya di The Mirah Bogor pada tanggal 6-9 Agustus 2024. Pada rapat consensus ini disepakati bahwa 6 judul RSNI-2 yang telah dikonsensuskan akan dilakukan perbaikan oleh konseptor sesuai

dengan masukan Komtek dan peserta rapat dan ditetapkan menjadi RSNI-3.

Tahap penyusunan SNI selanjutnya adalah jajak pendapat yang dalam hal ini akan dilakukan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk selanjutnya disahkan menjadi SNI.

Pada triwulan IV, 6 judul RSNI yang telah dikonsesuskan telah ditetapkan menjadi SNI oleh BSN pada tanggal 6 Desember 2024, dengan judul sebagai berikut:

- a. SNI 9275 : 2024 Pengelolaan benih bening lobster (*Panulirus spp.*)
- b. SNI 9267-1 : 2024 Udang Penaeid - Bagian 1 : Induk
- c. SNI 9267-2 : 2024 Udang Penaeid - Bagian 2 : Benih
- d. SNI 9267-3 : 2024 Udang Penaeid - Bagian 3 : Produksi Benih
- e. SNI 9276-1 : 2024 Ikan kuwe (*Caranx ignobilis*, Forsskal 1775) –Bagian 1: Induk
- f. SNI 9276-2 : 2024 Ikan kuwe (*Caranx ignobilis*, Forsskal 1775) – Bagian 2 : Benih

#### **D. Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya Bidang Perbenihan**

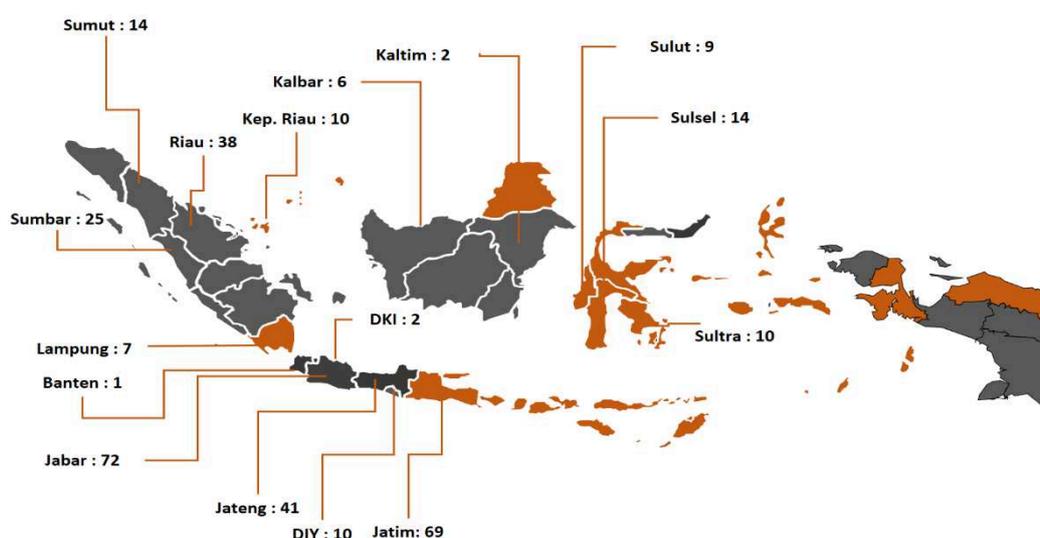
##### **D.1. Persentase Unit Usaha yang mendapatkan Pembinaan CPIB**

Pada tahun 2024, DJPB menargetkan sebanyak 150 unit pembenihan mendapatkan pembinaan dalam rangka persiapan menuju sertifikasi CPIB, dengan target pada IKU adalah 50% unit pembenihan yang mendapatkan pembinaan telah siap untuk dilakukan sertifikasi CPIB. Sampai dengan tahun 2024 telah dilakukan pembinaan terhadap 330 unit pembenihan.

Tabel 3.17. Capaian IKU Persentase unit usaha yang mendapatkan pembinaan CPIB

Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya									
Indikator Kinerja : Persentase unit usaha yang mendapatkan pembinaan CPIB									
Realisasi 2019 – 2023					2024			Renstra 2020 – 2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2024	% Capaian 2024 thd target 2024
-	-	-	-	-	50%	63,03%	126,06%	-	-

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa realisasi IKU persentase unit usaha yang mendapatkan pembinaan CPIB terealisasi sebanyak 63,03%. Kondisi melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 50%. Keberhasilan atas capaian ini disebabkan adanya tingkat kesadaran unit-unit pembenihan mengenai pentingnya sertifikasi CPIB bagi kelangsungan usaha mereka. Dengan tersertifikasinya unit pembenihan maka memberikan jaminan mutu atas produksi benih yang dihasilkan sehingga meningkatkan kepercayaan pasar.



Gambar 3.5. Peta Sebaran Unit Pembenihan Yang Dilakukan Pembinaan CPIB

Dari peta sebaran diatas, terlihat bahwa Jawa Barat tercatat sebagai wilayah dengan unit pembenihan terbanyak yang telah dilakukan pembinaan CPIB, yaitu sebanyak 72 unit pembenihan. Selanjutnya diikuti provinsi Jawa Timur sebanyak 69 unit pembenihan dan Riau sebanyak 38 unit pembenihan.

Sesuai dengan regulasi terbaru, yaitu Peraturan Presiden nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah diatur bahwa kewenangan sertifikasi dilaksanakan oleh Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP). Sedangkan DJPB bertugas melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan pembudidayaan ikan termasuk pembenihan.

## E. Terkelolanya Pemerintahan Yang Baik di Direktorat Rumput Laut

### E.1. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Rumput Laut

Indikator kinerja ini adalah adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna pengembangan profesionalitas profesi ASN. Indeks profesionalitas ASN diukur menggunakan standar profesionalitas ASN. Standar profesional ASN terdiri dari :

- a. Kualifikasi, merupakan dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan/atau keahlian khusus, sehingga seseorang tersebut mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai tugas jabatannya. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenjang riwayat pendidikan terakhir yang dicapai oleh PNS. Bobot dimensi ini sebesar 25%, dengan besaran sub-bobot : (i) S-3 sebesar 25%; (ii) S-2 sebesar 20%; (iii) S-1/D-IV sebesar 15%; (iv) D-III sebesar 10%; (v) SLTA/D-I/D- II/ sederajat sebesar 5%; dan dibawah SLTA sebesar 1%.
- b. Kompetensi, merupakan dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan yang tercermin melalui perilaku kinerja, yang dapat diamati, diukur, dan dievaluasi. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenis diklat yang pernah diikuti (seperti Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Kursus-kursus, dan Seminar/Workshop/Magang/Sejenis).

Tabel 3.18. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Rumput Laut

Sasaran Strategis : Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Direktorat Rumput Laut									
Indikator Kinerja: Indeks Profesional ASN Lingkup Direktorat Rumput Laut									
Realisasi 2019 – 2023					2024			RPJMN 2020 – 2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2024	% capaian 2024
64,10	74,56	78,78	81,88	84,91	85	89,46	105,25	85	105,25

Capaian Indeks Profesionalitas ASN unit kerja Lingkup Direktorat Rumput Laut pada tahun 2024 sebesar 89,46 atau 105,25% terhadap target tahunan dan target

Renstra DJPB tahun 2020-2024 sebesar 85. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023 terjadi kenaikan nilai sekitar 4,55 atau sekitar 5,35%. Untuk meningkatkan capaian di tahun berikutnya, maka diharapkan seluruh pegawai meningkatkan kompetensi dengan mengikuti pelatihan atau seminar/ webinar.

Rencana aksi atas hasil capaian tahun 2024, maka kepada seluruh pegawai agar meningkatkan kompetensinya dengan cara mengikuti seminar, pelatihan secara online maupun offline.

## E.2. Nilai PM SAKIP di Direktorat Rumput Laut

Nilai PM SAKIP Direktorat Rumput Laut merupakan indikator kinerja yang targetnya bersifat tahunan dan pencapaiannya dihitung di akhir tahun berdasarkan hasil penilaian Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal KKP terhadap pemenuhan dokumen dan capaian kinerja Direktorat Rumput Laut.

Tabel 3.19. Nilai PM SAKIP Direktorat Rumput Laut

Sasaran Strategis : Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Direktorat Rumput Laut									
Indikator Kinerja: Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (PM SAKIP) di Direktorat Rumput Laut									
Realisasi 2019 - 2023					2024			RPJMN 2020 - 2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2024	% capaian 2024
-	-	-	-	64,05	82	82,8	100,98	-	-

Realisasi PM SAKIP Direktorat Rumput Laut dapat dilihat pada tabel 3.17. Capaian pada tahun 2024 diperoleh nilai sebesar 82,8 atau sekitar 100,98% dari target yang telah ditetapkan sebesar 82. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023, maka nilai PM SAKIP terjadi kenaikan nilai sekitar 18,75 atau sekitar 29,27%.

Rencana aksi pada tahun 2025, maka Direktorat Rumput laut akan memaksimalkan sumberdaya yang ada untuk dapat memenuhi nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Rumput Laut.

## E.3. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Rumput Laut

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya yang dokumen tindak lanjutnya dari Direktorat Rumput Laut telah tuntas berdasarkan rekomendasi hasil pengawasan

Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Rumput Laut berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat) yang terbit pada Tahun yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Direktorat Rumput Laut yang menjadi objek pengawasan.

Tabel 3.20. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Rumput Laut

Sasaran Strategis : Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Direktorat Rumput Laut									
Indikator Kinerja: Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Rumput Laut									
Realisasi 2019 - 2023					2024			RPJMN 2020 - 2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2024	% capaian 2024
-	-	100%	100%	100%	80%	100%	125	80%	125

Pada tahun 2024 capaian hasil pengawasan inspektorat jenderal terhadap pelaksanaan kegiatan Direktorat Rumput Laut sebesar 100% atau sekitar 125% dari target yang telah ditetapkan sebesar 80%. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023, maka tidak terdapat persentase kenaikan karena pencapaian sudah maksimal.

Rencana aksi pada tahun 2025, Direktorat Rumput Laut mengupayakan tetap mempertahankan nilai capaian dengan memastikan semua hasil pengawasan kegiatan dilengkapi dan diselesaikan tepat waktu dan akuntabel.

#### **E.4. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Direktorat Rumput Laut**

Indikator Kinerja (IK) pada sasaran strategis ini adalah persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar. Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Penghitungan persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang standar, diperoleh dari

persentase unit kerja level 2 yang mendistribusikan informasinya melalui *platform Portal Collaboration Office*.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan upaya dalam hal pengelolaan SDM dan teknologi informasi untuk mendukung pencapaian IK dimaksud yaitu dengan menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan, dengan tujuan setiap user (pegawai) memiliki akses untuk mendistribusikan dan menerima informasi, sehingga diharapkan setiap individu di lingkup KKP memiliki pemahaman yang sama atas informasi yang dibagikan. Pengukuran dilaksanakan melalui penghitungan jumlah Unit Kerja lingkup KKP yang telah mengintegrasikan user manajemen pengetahuan dalam penggunaan aplikasi berbagi informasi dan data

Tabel 3.21. Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar Lingkup Direktorat Rumput Laut

Sasaran Strategis : Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Direktorat Rumput Laut									
Indikator Kinerja: Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Rumput Laut									
Realisasi 2019 - 2023					2024			RPJMN 2020 - 2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2024	% capaian 2024
92,47%	100%	100%	100%	133,33 %	94%	133,33 %	141,84	94%	133,33

Pada tahun 2024 target manajemen pengetahuan yang terstandar pada Direktorat Rumput Laut ditargetkan sebesar 94% dengan realisasi 133,33%. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023, maka tidak terdapat persentase kenaikan karena pencapaian sudah maksimal.

Rencana aksi tahun 2025 atas hasil capaian tahun 2024, eselon 2 selalu mempersiapkan laporan yang dianggap perlu untuk dipublikasikan secara benar dengan memperhatikan kaidah transparan, efisien selalu tepat waktu dan tepat sasaran.

### E.5. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas / Strategis Lingkup Direktorat Rumput Laut

Indikator Kinerja ini merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan/efektivitas dari pelaksanaan kegiatan Prioritas/Bantuan Pemerintah Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal KKP. Aspek yang dievaluasi meliputi:

1. Pencapaian tujuan (PT), diukur berdasarkan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan, berupa operasional dan kelengkapan bantuan, produksi dan pengelolaan bantuan secara berkelompok, dengan bobot 80%;
2. Integrasi (IG), diukur berdasarkan pemahaman penerima atas hak dan kewajiban, dengan bobot 10%; dan
3. Adaptasi (AT), diukur berdasarkan kemampuan penerima mengembangkan bantuan, dengan bobot 10%.

Tabel 3.22. Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Rumput Laut

Sasaran Strategis : Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Direktorat Rumput Laut									
Indikator Kinerja: Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Rumput Laut									
Realisasi 2019 - 2023					2024			RPJMN 2020 – 2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2024	% capaian 2024
-	75,48	94,04	89,71	93,46	80	82,56	103,20	-	-

Capaian tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Rumput Laut pada tahun 2024 mencapai 82,56 atau 103,2% dari target sebesar 80. Apabila dibandingkan pada periode yang sama dengan tahun sebelumnya, maka capaian tahun 2024 mengalami penurunan nilai sebesar sekitar 10,9 dari nilai 93,46 pada tahun 2023 menjadi 82,56 pada tahun 2024.

Rencana aksi di tahun 2025, untuk dapat meningkatkan tingkat efektivitas maka upaya yang harus diperhatikan dalam penyaluran bantuan harus memperhatikan pencapaian tujuan, integrasi dan adaptif.

#### **E.6. Jumlah Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi KUSUKA**

Indikator Kinerja ini merupakan penilaian atas capaian pendataan pelaku usaha yang telah terdaftar didatabase KUSUKA dengan status submit, valid dan revisi. Pendataan pelaku usaha bertujuan untuk mengumpulkan/updating data pelaku usaha yang terlibat dikegiatan Rumput Laut. Target total pelaku usaha yang terdaftar di KUSUKA pada tahun 2024 sebesar 91% (4.398 orang) dari target pelaku usaha yang terdaftar sebanyak 4.833 orang.

Tabel 3.23. Jumlah Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Terintegrasi KUSUKA

Sasaran Strategis : Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Direktorat Rumput Laut									
Indikator Kinerja: Jumlah Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Terintegrasi KUSUKA									
Realisasi 2019 - 2023					2024			RPJMN 2020 - 2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2024	% capaian 2024
-	-	-	-	694,89 %	91%	97,43%	107,07	-	-

Capaian indikator kegiatan Jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang terintegrasi KUSUKA tahun 2024 seperti tertera dalam tabel diatas. Realisasi tahun 2024 sebesar 97,43% atau 107,07% dari target tahun 2024 yaitu 91%. Kondisi ini menunjukkan bahwa persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang terintegrasi KUSUKA cukup besar dan sudah dikategorikan baik karena telah melebihi dari target.

Namun, jika dibandingkan pada periode yang sama dengan tahun sebelumnya, maka realisasi tahun 2024 mengalami penurunan nilai yang cukup besar, sehingga dalam pelaksanaan selanjutnya akan dioptimalkan kembali.

Rencana tindak lanjut di tahun 2025 adalah pelaku usaha yang terlibat di kegiatan Rumput Laut didorong untuk mendaftar di aplikasi KUSUKA sehingga tercantum di database.

### **E.7. Nilai Pengawasan Kearsipan Unit Kearsipan Direktorat Rumput Laut**

Pengawasan Kearsipan Unit Kearsipan Direktorat Rumput Laut adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Dalam kegiatan ini akan dilakukan audit kearsipan yang merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan.

Kearsipan sendiri adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tabel 3.24. Nilai Pengawasan Kearsipan Unit Kearsipan Direktorat Rumput Laut

Sasaran Strategis : Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Direktorat Rumput Laut									
Indikator Kinerja: Nilai Pengawasan Kearsipan Unit Kearsipan Direktorat Rumput Laut									
Realisasi 2019 - 2023					2024			RPJMN 2020 - 2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2024	% capaian 2024
-	-	-	-	-	75	79,75	106,33	-	-

Capaian indikator kegiatan nilai pengawasan kearsipan unit kearsipan Direktorat Rumput Laut tahun 2024 sebesar 79,75 atau 106,33% dari target nilai 75. Indikator ini merupakan indikator baru, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun demikian, sebagai rencana aksi kedepannya, Direktorat Rumput Laut berupaya untuk meningkatkan nilai yang telah dicapai pada tahun sebelumnya.

### E.8. Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Rumput Laut

Persentase layanan perkantoran direktorat Rumput Laut adalah indikator kinerja kegiatan yang pencapaiannya perlu dilaksanakan karena indikator kinerja ini merupakan ukuran atas pelaksanaan layanan perkantoran yang meliputi pelayanan jasa dan administrasi yang dilaksanakan di Direktorat Rumput Laut.

Tabel 3.25. Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Rumput Laut

Sasaran Strategis : Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Direktorat Rumput Laut									
Indikator Kinerja: Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Rumput Laut									
Realisasi 2019 - 2023					2024			RPJMN 2020 - 2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2024	% capaian 2024
-	-	-	100%	100%	80%	100%	125	-	-

Capaian indikator kegiatan persentase layanan perkantoran tahun 2024 mencapai 100% atau 125% dari target 80% yang telah ditetapkan. Pencapaian indikator ini merupakan hasil kerja Direktorat Rumput Laut terutama terkait pelayanan perkantoran seperti pelayanan persuratan berdasarkan permintaan nomor surat dan layanan rapat yang dilakukan secara offline yang semuanya telah tuntas dilakukan.

Rencana aksi atas capaian tahun 2024 mempertahankan hasil maksimal untuk pencapaian target tahun 2025.

### E.9. Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Rumput Laut

Persentase realisasi keuangan Direktorat Rumput Laut adalah indikator kinerja kegiatan yang pencapaiannya perlu dilaksanakan karena Indikator kinerja ini merupakan ukuran atas realisasi penyerapan anggaran berdasarkan terhadap pagu anggaran Direktorat Rumput Laut.

Tabel 3.26. Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Rumput Laut

Sasaran Strategis : Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Direktorat Rumput Laut									
Indikator Kinerja: Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Rumput Laut									
Realisasi 2019 - 2023					2024			RPJMN 2020 - 2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	Target 2024	% capaian 2024
-	-	-		99,98%	98%	99,7%	101,73	-	-

Capaian indikator kegiatan Persentase Realisasi Kuangan Direktorat Rumput Laut tahun 2024 mencapai 99,7% atau sebesar 101,73% dari target yang telah ditetapkan. Apabila dibandingkan pada periode yang sama dengan tahun sebelumnya, maka capaian tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,28% dari 99,98% pada tahun 2023 menjadi 99,7% pada tahun 2024.

Rencana aksi atas hasil capaian tahun 2024, Direktorat Rumput Laut akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan sehingga realisasi anggaran meningkat.

## BAB 4.

### PENUTUP

#### 4.1. KESIMPULAN

1. Laporan Kinerja (LKJ) Direktorat Rumput Laut tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala terhadap capaian strategis Direktorat Rumput Laut pada tahun 2024.
2. Terhadap capaian kinerja, selanjutnya dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian tahun sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.

3. Secara umum, sasaran kegiatan beserta Indikator Kinerja Direktorat Rumput Laut yang diperjanjikan pada target yang ditetapkan dengan nilai kinerja organisasi (NKO) sangat baik dengan nilai 104,01 namun ada indikator kinerja yang dibawah target yakni target peningkatan kerja dibidang rumput laut.

#### **4.2. REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja selama bulan januari sampai dengan Desember 2024 di Direktorat Rumput Laut sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Perlu mempertahankan target – target indikator kinerja Utama (IKU) yang sudah tercapai dengan melakukan monitoring dan pendokumentasian yang baik sehingga konsistensi pencapaian target kinerja dapat dipertahankan.
2. Direktorat Rumput laut akan memantau dan berkoordinasi dengan bagian Program DJPB kemungkinan penyesuaian target apabila terjadi perubahan anggaran, hal ini untuk menghindari terjadi revisi perjanjian kinerja.
3. Melakukan koordinasi dengan bagian program terkait perhitungan target tenaga kerja, untuk menghindari tidak tercapainya target yang ditetapkan , kondisi ini karena adanya perubahan nomenklatur dari Direktorat Perbenihan menjadi Direktorat Rumput Laut yang berdampak pada besaran target yang ditetapkan.
4. Direktorat Rumput Laut akan memperbaiki dalam perencanaan kedepan agar pembayaran dapat dibayarkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.